

**FAKTOR-FAKTOR DAN STRATEGI  
KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMENANGAN  
PEMILIHAN UMUM**

**KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**Studi Kasus Kemenangan Pasangan Neneng Hasanah Yasin  
dan Rohim Minteraja dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi  
Tahun 2012**

**SITI KHODIJAH  
0901186039**

**Tesis ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Politik**



**UNIVERSITAS NASIONAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU POLITIK**

**2013**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**FAKTOR-FAKTOR DAN STRATEGI  
KOMUNIKASI POLITIK  
DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
Studi Kasus Kemenangan Pasangan Neneng Hasanah Yasin  
dan Rohim Minteraja dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi  
Tahun 2012

Tesis ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Program Magister Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

Jakarta, Februari 2013

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

  
Dr. TB. Massa Djafar

Pembimbing,

  
Drs. Aris Munandar, M.Si

## PERNYATAAN

Dengan ini Saya Menyatakan bahwa;

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyempurnaan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jakarta, Februari 2013

Yang Membuat Pernyataan

(Siti Khodijah)

0901186039

## ABSTRAK

Universitas Nasional  
Sekolah Pascasarjana Program Study Magister Ilmu Politik  
TESIS, 2013  
Siti Khodijah / 0901186039

### **FAKTOR-FAKTOR DAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

#### **Studi Kasus Kemenangan Pasangan Neneng Hasanah Yasin Dan Rohim Minteraja dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012**

Pemilukada merupakan salah satu instrumen desentralisasi politik, dimana dimungkinkan terjadinya *transfer* kekuasaan dari pusat ke daerah. Melalui pemilukada perwujudan perwakilan dan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi tahun 2012 mempunyai tiga pasang calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi, (1) Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, Pasangan ini di usung dari 3 partai; (2) Pasangan Sa'duddin dan Jamal Lula'il, diusung dari 3 partai lain dan; (3) Pasangan M. Darip Mulyana dan Jejen Sayuti, Diusung dari 7 partai. Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, suara terbanyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi diraih oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan NERO dan bagaimana strategi pemenangannya, dengan rumus permasalahan (1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan NERO; (2) Bagaimana Strategi Komunikasi Politik yang dilakukan dengan 3 (tiga) konsep dasar sebagai pijakan (1) Strategi komunikasi politik, (2) Partisipasi politik dan (3) *Marketing* politik. Studi kasus dilakukan adalah dengan wawancara dan pengumpulan dokumen berkaitan dengan pemenangan NERO dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. sebagai temuan ternyata faktor yang sangat menentukan kemenangan pasangan Neneng Hasanah Yasin dengan Rohim Minteraja yaitu faktor ketokohan ayahandanya M. Yasin, yang merupakan salah satu orang terkaya di Kabupaten Bekasi, serta didukung tim pemenangan yang bekerja dengan baik.

Daftar Pustaka: 101 Halaman, 32 Buku, 4 Tabel, 2 Dokumen, 2 Halaman Lampiran, 1 Jurnal, 3 Website.

Dosen Pembimbing: Drs. Aris Munandar, M.Si.

## ABSTRACT

National University  
The Graduate School of Political Science Masters Program Study  
THESIS 2013  
Siti Khodijah/0901186036

### **FACTORS AND STRATEGY POLITICAL COMMUNICATION OF THE BEKASI DISTRICT ELECTION IN 2012**

**Neneng Hasanah Yasin and Rohim Minteraja the Winner Bekasi District Election in 2012.**

Pemilukada is one of the instruments of political decentralization, which made possible the occurrence of a transfer of power from the centre to the area. Through representation and embodiment pemilukada popular sovereignty can be enforced. The election directly Head region and the Deputy Chief of The Bekasi Regency is one of the forms of democracy in 2012 has three pairs of prospective candidates in the Region and Deputy Head of the area's competed in the election Districts in the Regency of Bekasi, (1) France Partner Hasanah Yasin and Rohim Minteraja, the couple on the stretcher from the 3rd parties; (2) Sa'duddin Couples and Jamal Lulail, carried from another party and 3; (3) couples M. Darip Jejen Mulyana and Sayuti, Carried from 7 party. Based on the final results of the General Election Commission's recap of the Regencies in Jakarta, the head of The most votes and Deputy Chief of The Bekasi district won by pairs Neneng Hasanah Yasin and Rohim Minteraja (NERO).

The focus of this research is to examine the factors that affect victory pemenangannya strategy and how NERO, with the formula issues (1) what factors affect NERO'S victory; (2) How political Communication Strategies do with 3 (three) basic concept as the footing (1) Political Communication Strategies, (2) Political Participation and (3) Marketing of Politics. The case study is done is with interviews and the collection of documents related to the winner in the election of Regional Heads NERO Regency of Bekasi. As the findings turned out to be a very decisive victory factor pair Neneng Hasanah Yasin with Rohim Minteraja i.e. the lights his father factor M. Yasin, who is one of the richest men in Regency of Bekasi, as well as supported businesses that work with teams either.

Content: 101 Pages, 32 books, 4 Table, 2 documents, 3 Website  
Lecturer Advisor: Drs. Aris Munandar, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji syukur atas segala keberkahan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis, dengan berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR DAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI (Studi Kasus Kemenangan Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional, atas dari itu, dengan selesainya tugas penulis menyelesaikan tesis ini, penulis bermaksud mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis pada saat proses perkuliahan hingga akhir penyusunan tesis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Drs. Aris Munandar, M.Si., selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran yang membangun. Serta kesabaran dan ketelatenan yang pembimbing berikan kepada saya selama proses penyusunan tesis ini. Dr. TB. Massa Djafar, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional yang telah memberikan arahan dan dorongan yang membangun kepada penulis. Dr. Mohammad Noer, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional yang telah memberikan inspirasi dan dorongan

selama kepada penulis. Seluruh Dosen/Staf Pengajar Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan seluruh Staf Tata Usaha, yang banyak membantu memberikan informasi dan dukungan moril selama proses perkuliahan berlangsung. Ayah dan Ibu tercinta, serta kakak dan adik penulis tersayang, terimakasih atas cinta kasih dan dukungan serta doa yang luar biasa terhadap penulis selama proses perkuliahan Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional. Tim Gabungan Pemenangan dr. Neneng Hasanah Yasin. juga seluruh Narasumber, dan anggota KPUD Kabupaten Bekasi yang berkenan meluangkan waktunya bagi penulis dalam memperoleh informasi dan data. Kakanda Rochendi yang telah banyak memberikan dukungan moril terhadap penulis, serta kakanda, adinda, dan sahabat, keluarga besar HMI Cabang Bekasi, pengurus Kohati PB HMI periode 2008-2010, juga Asnadi Madiya, S.H., M.H., dan teman saya Ihsanudin, serta untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terimakasih banyak semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian semua. Amien

Jakarta, Februari 2013

**Siti Khodijah**  
0901186036

## DAFTAR TABEL

1.	<b>Tabel 2.1.</b> Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Per-Kecamatan .....	41
2.	<b>Tabel.3.1</b> Rekapitulasi Jumlah pemilih Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Kabupaten Bekasi .....	60
3.	<b>Tabel.3.2</b> Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bekasi .....	62
4.	<b>Tabel.3.3</b> Suara Tidak Sah .....	63

## DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEMKA	: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BKMB	: Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi
BLK	: Balai Latihan Kerja
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CBL	: Cikarang Bekasi Laut
DI	: Daerah Irigasi
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemili Tetap
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
GOLKAR	: Golongan Karya
H	: Haji
Hj	: Hajjah
H.M	: Haji Muhammad
K.H	: Kyai Haji
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
NERO	: Neneng-Rohim

PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PD	: Partai Demokrat
PEMILUKADA	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PP	: Peraturan Pemerintah
PPDP	: Petugas Pemuktahiran Data Pemilih
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori .....	11
D.1. Strategi .....	11
D.2. Komunikasi Politik .....	13
D.3. Strategi Komunikasi Politik .....	15
D.4. Partisipasi Politik .....	25
D.5. <i>Marketing</i> Politik .....	28
E. Metode Penelitian .....	30
E.1. Pendekatan Penelitian .....	30

E.2. Subyek Penelitian .....	31
E.3. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E.4. Teknik Analisis Data .....	33
E.5. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Bekasi .....	35
B. Kondisi Geografis dan demografis kabupaten Bekasi .....	36
C. Pembangunan Kabupaten Bekasi dari Masa ke Masa .....	39
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN NENENG HASANAH YASIN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BEKASI 2012 .....</b>	<b>46</b>
A. Perjalanan Pelaksanaan Pilkada di Indonesia .....	46
B. Kontroversi Kasus Pilkada Kabupaten Bekasi Tahun 2012 .....	52
C. Hasil Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati NERO	53
D. Faktor Kemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilihan .....	58
D.1. Faktor Figur Calon .....	59
D.1.1. Faktor Figur Neneng Hasanah Yasin .....	59
D.1.2. Faktor Ketokohan Orang Tua Neneng Hasanah Yasin	62
D.2. Faktor Partai Pendukung .....	67
D.3. Faktor <i>Marketing</i> Politik .....	68
<b>BAB IV STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN NENENG HASANAH YASIN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BEKASI .....</b>	<b>78</b>

A. Strategi Pemenangan .....	78
A.1. Startegi Mobilisasi Mesin Partai .....	78
A.2. Strategi Pengerahan Kader Partai .....	88
A.3. Strategi Program Kampanye Kandidat .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>198</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan pada tahun 2005 merupakan awal dari babak baru prosesi pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah tersebut menyusul pemilihan presiden secara langsung yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Bagi rakyat secara keseluruhan, pemilihan secara langsung itu adalah pesta rakyat, waktu dimana warga negara Indonesia memiliki hak pilihnya secara langsung, dan berkesempatan menentukan siapa yang akan memimpin mereka satu periode ke depan, ini merupakan perkembangan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Demokrasi menjadi langkah maju Indonesia dengan adanya pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung.

Pada dasarnya, pemerintahan demokratis merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (*fairness competition*) dalam perebutan suara rakyat.

Salah satu tujuan dari reformasi untuk mewujudkan Indonesia baru adalah Indonesia yang lebih demokratis, yang menjadi konsekuensi dari tuntutan demokrasi yang dilakukan di era reformasi adalah dengan memilih Kepala Daerah sesuai dengan harapan masyarakat seutuhnya, pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga merupakan perwujudan dari adanya negara yang demokratis.

“Pelaksanaan Pemilukada langsung merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memilih secara langsung Kepala Daerah, sehingga konteks aturan yang berlaku dalam Pemilukada merupakan jabaran atau turunan yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam perspektif desentralisasi politik, dengan adanya Pemilukada maka kekuasaan tidak lagi terkonsentrasikan pada pemerintah pusat, tetapi dapat di distribusikan ke daerah-daerah. Dengan demikian, daerah memiliki posisi yang jauh lebih kuat untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut”.<sup>1</sup>

Pemilukada merupakan salah satu instrumen desentralisasi politik tersebut, dimana dimungkinkan terjadinya *transfer* kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilukada sebagaimana pemilu tingkat nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui Pemilukada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilukada perwujudan perwakilan dan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilukada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Usulan Draf Naskah Akademis Revisi UU 32 tahun 2004, [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), 2010 di akses tanggal 11 oktober 2012

“Berdasarkan UUD Republik Indonesia 1945, warga negara secara keseluruhan berhak atas kedaulatan yang mereka miliki, merupakan bentuk hak asasi sebagai warga negara Indonesia, yang dimana masyarakat berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya sendiri, antara lain dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung”.<sup>2</sup>

Pemilukada langsung membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung baik para elit partai, tokoh agama, tokoh masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, sehingga untuk mendapatkan kursi duduk sebagai pemenang, seorang kandidat harus mampu menarik perhatian kepada masyarakat. Hal ini juga memberikan inspirasi bagi para calon kandidat untuk tarik menarik masyarakat (*grass root*) sehingga peran partai politik harus beriringan dengan kandidat, baik partai dan kandidat mempunyai citra yang dapat menarik pemilih maka dari itu tidak jarang pemilukada menggunakan jasa konsultan atau lembaga *survey*.

“Disamping mobilisasi dari partai, dalam pemilukada langsung dibutuhkan perencanaan strategi untuk memenangkan kandidat, dari berbagai perencanaan strategi yang akan dibuat, strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik yang mempunyai tujuan memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarahkan kepada perubahan masyarakat”.<sup>3</sup>

Dalam strategi politik perlu adanya komunikasi yang efektif, tepat dan efisien sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengena target-target yang dituju agar kemenangannya lebih bernilai pada proses demokrasi. Hovland, Janis dan

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005, hal. 53

<sup>3</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fur diefreiheit Indonesia, 2008, hal. 116

Kelly membuat definisi komunikasi bahwa “ *Communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience)*”, artinya Komunikasi adalah proses dimana seorang individu (komunikator) mentransmisikan rangsangan (biasanya verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (penonton).

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungan dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia, (2) melalui pertukaran informasi, (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, salah satu tujuan dari adanya komunikasi politik yaitu untuk mencapai tujuan politik dalam pemenangan kandidat, dimana komunikasi digunakan untuk mempengaruhi setiap individu untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan komunikasi selalu melibatkan manusia dalam berinteraksi, artinya komunikasi selalu melibatkan pengirim dan penerima yang memainkan peranan penting dalam proses komunikasi.

Dalam lingkup komunikasi politik terkait dengan beberapa hal yaitu mengenai komunikator politik (siapa), pesan-pesan politik (berkata apa), media komunikasi politik (melalui saluran apa), khalayak politik (kepada siapa), dan efek politik (bagaimana efeknya).

Dalam mempengaruhi khalayak perlu adanya langkah pertama dalam strategi komunikasi politik adalah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, artinya ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga

---

<sup>4</sup> Hafied Cagara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

politik dalam masyarakat akan memiliki pengaruh sendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam penyusunan pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.

“Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (*al-amin*), daya tarik dan kekuasaan. sementara itu, menurut Rahmat (1985) ketokohan sama dengan etos yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan dapat disebut juga pahlawan politik”.<sup>5</sup>

Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang memiliki ciri diatas disebut mempunyai citra diri. citra begitu penting bagi seorang komunikator. Dalam sosialisasi politik, khalayak dapat mengetahui citra dari kandidat yang akan dipilihnya melalui berbagai media berupa radio, majalah, surat kabar dan televisi. Selain itu, partai politik yang dapat dipercaya dan sesuai dengan harapan masyarakat tentang kinerja yang dilakukan oleh partai politik bisa menjadi salah satu citra diri dari partai politik. Publik sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, sehingga dalam strategi komunikasi politik langkah strategis kedua harus memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga dengan citra.

Partai politik sebagai satu-satunya jalur dalam rekrutmen kepemimpinan daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung, tanpa melibatkan institusi lain, partai politik mempunyai andil besar bagaimana merawat tokoh dan kelembagaan agar dapat membentuk citra yang positif

---

<sup>5</sup> Anwar Arifin. *Pencitraan dalam Politik, Strategi dalam Pemenangan PEMILU dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006, hal. 53

terhadap masyarakat dalam pembentukan opini publik, untuk menarik dukungan rakyat dalam Pilkada.

“Momentum besar yang menjadi bagian dari terwujudnya masyarakat yang berdaulat adalah kedaulatan warga negara Indonesia dalam partisipasi secara aktif menentukan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka secara langsung. Warga Negara Indonesia juga berhak untuk dipilih dan memilih. Pada prinsipnya, pelaksanaan demokrasi dalam proses Pilkada langsung memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 sampai dengan 119, dimana dalam Pasal 56 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>6</sup>

“Pilkada yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan didukung PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga merupakan koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan), dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan Pilkada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal”.<sup>7</sup>

Di lihat dalam kutipan di atas, peningkatan demokrasi di Indonesia juga menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi di seluruh bagian di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Bekasi yang menjadi fokus wilayah penelitian penulis berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2012.

Pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Pemilihan

---

<sup>6</sup> Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 91

<sup>7</sup> Lili Ramli, *Potret Otonomi Daerah dan wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 22-23

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Bekasi mempunyai tiga pasang calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi :

1. Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja;

Pasangan ini di usung dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional

2. Pasangan Sa'duddin dan Jamal Lulail;

Diusung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Pasangan M. Darip Mulyana dan Jejen Sayuti;

Diusung dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PBB, Partai Gerindra, PBR, dan PKPI.

Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perolehan suara terbanyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi diraih oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, S.Sos, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, dengan memperoleh suara sah sebanyak **442.857 suara** dengan presentase **41,06%** dari **1.078.603 suara**.

Nomor urut dua yaitu pasangan Sa'duddin dan Jamal Lulail, yang di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sah sebanyak **331.638 suara** dengan presentase **30,75 %** dari **1.078.603 suara**.

“Pasangan dengan nomor urut tiga yaitu pasangan M. Darip Mulyana dan Jejen Sayuti, yang di usung dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PBB, Partai Gerindra, PBR, dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak **304.108 suara** dengan presentase **28,19 %** dari **1.078.603 suara**”.<sup>8</sup>

Hasil suara yang di peroleh masing-masing pasangan calon. Pada dasarnya, melalui mekanisme proses kepartaian dan berkoalisi, sehingga masing-masing kandidat mempunyai cara tersendiri dalam strategi komunikasi politik, dengan memobilisasi masyarakat melalui pencitraan yang baik sebagai figur kandidat agar dapat memperoleh simpati dan dukungan rakyat dalam pemilihan. Oleh karena itu tiap tim pemenangan membutuhkan konsep dan strategi politik yang matang untuk bisa memenangkan kandidatnya melalui strategi komunikasi politik yang matang untuk mencapai tujuan politik yang diharapkan.

Perolehan suara terbanyak dengan nomor urut 1 (satu) Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja adalah hasil dari kerja tim pemenangan melalui strategi komunikasi politik dan marketing politik tersebut menjadi bentuk kerja tim dalam memenangkan kandidat. Neneng Hasanah Yasin yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar, dan Rohim Minteraja menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Demokrat. Hal ini memudahkannya dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bekasi

---

<sup>8</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab\_011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012

dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Neneng dan Rohim yang diusung dari partai besar yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat merupakan bentuk koalisi partai yang memberikan kontribusi terhadap kemenangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2012. Selain itu partai pendukung yaitu PAN juga memberikan kontribusi terhadap kemenangan pasangan tersebut. Koalisi ketiga partai tersebut menjadi salah satu bagian dari faktor kemenangan Neneng dan Rohim.

Selain dari hal tersebut di atas, pastinya banyak faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi kemenangannya. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian penulis dengan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan NERO dan bagaimana strategi komunikasi politik dan *marketing* politik yang dilakukan tim kemenangan Neneng Hasanah Yasin sehingga mendapat kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi Secara Geografis, adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Barat yang terbagi atas 23 Kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk adalah sebesar 2.656.601 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.747 jiwa per Km<sup>2</sup> bertambah 1 % bila di bandingkan tahun 2010 dengan jumlah penduduk 2.630.401 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.722 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Bekasi juga sebagai daerah yang sangat dekat dengan DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi memiliki berbagai potensi ekonomi di sektor industri, perdagangan, jasa, sumber daya manusia, modal yang tersebar di berbagai wilayah dan sumber daya alam meliputi pertanian, pertambangan dan pariwisata,

kesemuanya ada di Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi 14,04% terhadap PDRP di Provinsi Jawa Barat. Penyumbang paling besar PDRP Kabupaten Bekasi adalah sektor industri, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, bank dan lembaga keuangan lainnya serta pertanian. Melihat Kabupaten Bekasi secara geografis, dan jumlah penduduk yang besar, juga melihat dari sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi. Atas dasar itulah kemudian penulis berminat melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, penelitian ini penulis mengambil judul **“Faktor-Faktor dan Strategi Komunikasi Politik dalam Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Kemenangan Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012)”**.

Topik ini memfokuskan pada upaya penjelasan faktor-faktor yang berpotensi memberi kontribusi terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin dan secara khusus memakai strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi.

2. Bagaimana Strategi Komunikasi Politik yang dilakukan Tim Pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini memfokuskan pada figur Neneng Hasanah Yasin sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, figur orang tua, peran serta partai pendukung, dan faktor *marketing* politik tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.

### C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan faktor-faktor kemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi.
2. Menjelaskan strategi komunikasi politik yang dilakukan Tim Pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi.

### D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, ada tiga konsep dasar yang akan diuraikan di bawah ini, sebagai pijakan dalam melakukan penelitian tesis ini, konsep tersebut adalah strategi komunikasi politik, partisipasi politik dan *marketing* politik.

#### D.1. Strategi

“Karl Von Clausewitz (1780-18310) merumuskan strategi sebagai ”sesuatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang”, sementara Marthin-Anderson (1968) merumuskan ” strategi adalah seni

yang melibatkan kemampuan inteligensi/ pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien".<sup>9</sup>

Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis :

S : Strengths : Kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai/ kandidat

W : Weakness : Kelemahan yang ada dipartai /kandidat

O : Opportunities : Peluang yang mungkin bisa diperoleh partai

T : Threats : Ancaman –ancaman yang bisa ditemui oleh partai

Pada prinsipnya, dalam momentum mencapai sebuah kemenangan harus adanya strategi matang untuk melahirkan kemenangan dari apa yang diharapkan. Sama halnya dengan pemilihan Kepala Daerah, suatu kemenangan dapat di capai jika tim pemenangan berupaya keras melalui perencanaan strategi yang matang dan diterapkan melalui pendekatan secara personal dengan konsituen dengan strategi komunikasi yang handal sehingga mampu menarik konsituen untuk memilih sesuai dengan pemimpin yang disosialisasikan.

Selain itu, strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yakni “kemenangan” dan sebuah kemenangan akan tercapai jika dilakukan dengan fokus, baik teliti dalam hal mandat, dan perolehan suara.

“Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankan program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi, pengalaman membuktikan bahwa langkah semacam itu biasanya tidak direncanakan secara matang, baik oleh partai politik atau pemerintah. Jika tidak demikian halnya, tidak mungkin ada begitu banyak proyek gagal. Dalam prakteknya, seringkali

<sup>9</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*.hal.2

hasil proyek dan perencanaan yang demikian mengakibatkan masyarakat berusaha memberikan perlawanan, kemudian tidak mentaati peraturan”.<sup>10</sup>

“Strategi adalah rencana tentang serangkaian kegiatan dan *manuver*, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Di dalam strategi yang baik terdapat fungsi-fungsi manajemen, koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif”.<sup>11</sup>

## D.2.Komunikasi Politik

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, berasal dari kata *communis* yang berarti sama, yang dimaksud sama disini yaitu memiliki makna yang sama.<sup>12</sup> Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperbincangkan.

“Carl I. Hovland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication in the process to modify the behavior of other individuals*). Sementara itu menurut Shachter (1961) komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. Definisi seperti itu menempatkan komunikasi sebagai unsur kontrol sosial dimana seseorang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi perilaku, keyakinan, sikap, dan seterusnya dari orang lain dalam suatu suasana sosial”.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>11</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/strategi> di unduh tanggal 2-januari 2013

<sup>12</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 9

<sup>13</sup> Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik, Teori dan Praktek dalam Pilkada Langsung*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011, hal. 5

Roberts (1977) menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat khalayak.<sup>14</sup>

“Menurut Dahlan (1999), komunikasi politik ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku atau kegiatan komunikasi dan bersifat politik, atau berpengaruh pada perilaku politik. Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkahlaku khalayak yang menjadi target politik”.<sup>15</sup>

Komunikasi bukan hanya sekedar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik, ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan, atau tema pokok.<sup>16</sup>

“Menurut Eko Hary Susanto, komunikasi politik menyangkut penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan makna bersama, lebih lanjut Susanto menyatakan bahwa komunikasi politik dapat diamati melalui lima komponen, yaitu: (1) Komunikator politik, (2) Pesan politik, (3) Media komunikasi politik, (4) Khalayak komunikasi politik, (5) Dampak komunikasi politik”.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Anwar Arifin. *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003, hal.105

<sup>15</sup> Hafied Canggara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal.35

<sup>16</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h.5

<sup>17</sup> Anwar Arifin. *Media dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Pusat Studi Komunikasi & Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, 2011, hal.200

“Beberapa Ilmuwan juga melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Karena itu, komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisa permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Bahkan Plano (1982:24) melihat bahwa “Komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik”.<sup>18</sup>

### D.3. Strategi Komunikasi Politik

“Strategi komunikasi politik akan berjalan efektif jika dapat menjaga beberapa hal untuk mencapai tujuan politik yang diharapkan, diantaranya: (1) merawat ketokohan dan kelembagaan, (2) memantapkan kelembagaan, dan (3) menciptakan kebersamaan”.<sup>19</sup>

#### (1) Ketokohan dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat. Suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat

<sup>18</sup> Lely Arriane, *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di panggung Politik*, Bnadung: Widya Padjajaran, 2010, hal.15

<sup>19</sup> Anwar Arifin. *Pencitraan dalam Politik, Strategi Pemenangan PEMILU dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006, hal.53-63

ketokohan dan memantapkan kelembagaan politik merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan<sup>20</sup>.

Menurut Iif Syarif Bustomi Wakil Ketua tim sukses NERO dari Partai Golkar mengatakan bahwa :

“Keberhasilan NERO pada Pemilu pada Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor kekuatan ketokohan yang selalu dibina oleh partai Golkar sebagai partai pengusung Neneng sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, selain itu ketokohan M. Yasin (Bapak dari Neneng) juga sangat membantu keberhasilan Neneng menjabat sebagai Bupati pada Pemilu pada tahun 2012”.<sup>21</sup>

## (2) Memantapkan Kelembagaan

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis utama dan pertama yang harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Hal ini sangat penting sebagai faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama berkaitan dengan kampanye dan pemberian suara dalam pemilu.

“Lembaga yang dimaksud adalah wadah kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik, lembaga itu dapat berupa partai politik, parlemen dan pemerintah atau birokrasi. Lembaga-lembaga nonpolitik pada dasarnya memiliki juga kekuatan politik, meskipun kecil dan tentu tidak sama dengan kekuatan lembaga politik”.<sup>22</sup>

Citra diri partai politik adalah sesuatu yang dipercaya dan diharapkan oleh rakyat tentang apa yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Jadi, khalayak

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.53-54

<sup>21</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis di sekretariat gabungan tim sukses pemenangan .Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja,S.Sos, Jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 19-10-2012, jam 13.00-15.30

<sup>22</sup> Anwar Arifin. *Pencitraan dalam Politik, Strategi Pemenangan PEMILU dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006, hal.56

dapat mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu, meskipun ia tidak menyukai aktifitas partai politik tersebut. Dengan kata lain citra partai politik secara selektif akan memainkan peran-peran penengah yang menerjemahkan aktivitas yang berlangsung dalam lingkungan politik kedalam makna bagi khalayak politik, terutama pemberi suara dalam pemilu.

If Syarif Bustomi mengungkapkan :

”Pencalonan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi yang di usung oleh Partai Golkar ini, mengalami perpecahan di tubuh internal Partai Golkar, yang dimana ketua DPD Partai Golkar M. Darip Mulyana mencalonkan diri sebagai Bupati pada saat itu, justru tidak mendapat restu dari Partai Golkar. Karena itu, Partai Golkar melakukan penguatan secara kelembagaan untuk melakukan komunikasi internal kepada pengurus dan kader-kader partai golkar hingga ke tingkat desa”.<sup>23</sup>

### (3) Menciptakan Kebersamaan

“Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofilis. Hal itu diperlukan agar komunikator politik dapat melakukan empati. Suasana homofilis yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik, metode, dan media politik. Namun yang sangat penting adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi kepada khalayak, artinya politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayak”.<sup>24</sup>

Selain itu, strategi politik juga terdiri dari beberapa bagian mengenai isu politik, bentuk-bentuk komunikasi, media komunikasi, yang digunakan dan diperhatikan dalam memenangkan kandidat atau calon yang akan di usung.

<sup>23</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis di sekretariat gabungan tim sukses pemenangan .Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja,S.Sos, jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 19-10-2012, jam 13.00-15.30

<sup>24</sup> *Ibid*, Anwar Arifin, hal.63

Romi Oktaviansyah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa :

“Sebagai anggota DPRD Saya seringkali melakukan bakti sosial, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat Muaragembong daerah pemilihan saya, selain itu disetiap kesempatan saya juga sering berkomunikasi santai dengan warga sekitar. Sehingga saat pencalonan NERO sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bekasi, saya mudah berkomunikasi dan mensosialisasikan NERO pada masyarakat di Dapil saya. Dengan begitu masyarakat tidak merasa saat butuhnya saja saya berkomunikasi dengan mereka”.<sup>25</sup>

### E.3.1. Isu Politik

Pemenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012 juga tidak terlepas dari isu politik mengenai :

#### a) Figur Politik

Figur calon yang disukai oleh konsituen akan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Daerah. Oleh karenanya, calon Kepala Daerah harus memiliki karakter ataupun menjadi figur yang sesuai dengan harapan masyarakat, bisa juga calon Kepala Daerah membentuk *image* yang bisa menarik masyarakat memilihnya.

#### b) Visi Misi Calon

Dalam pemilu visi misi calon harus disesuaikan dengan sasaran yang akan dituju berhubungan dengan mayoritas suara, yaitu berkaitan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut<sup>26</sup>:

<sup>25</sup> Informasi diperoleh dari hasil wawancara langsung penulis dengan narasumber, bertempat di Bekasi Squaer, tanggal 09-11- 2012, jam: 14.00-15.30

<sup>26</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*.hal.41-42

- Apa yang perlu direncanakan?
- Sasaran apa yang sebenarnya akan dicapai?
- Dengan sarana apa dan bagaimana sasaran tersebut akan tercapai?
- Sampai kapan sasaran tersebut akan dicapai?
- Dan mengapa sasaran harus dicapai?

Iif Syarif Bustomi mengatakan :

“Visi misi dan program kerja dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi, diantaranya adalah mengenai pemberian upah tambahan khusus untuk RT, menurut pandangan tim sukses NERO, setiap RT memiliki keluarga dan anak, juga keluarga besar, sehingga dari lingkup yang kecil saja satu RT, minimal bisa bawa 5 konsituen”.

Telaah dari apa yang disampaikan oleh Iif Bustomi, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar tersebut, bahwasanya visi misi dan program kerja yang dibuat oleh tim pemenangan NERO, dibuat berdasarkan dengan sasaran yang ingin dicapai agar masyarakat yang memiliki hak suara, bisa memilih pasangan NERO pada Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012.

### E.3.2. Bentuk-bentuk komunikasi

“Terdapat berbagai bentuk komunikasi politik yang biasa dilakukan oleh politikus atau aktivitas politik untuk mencapai tujuan politiknya. Teknik komunikasi yang dilakukan diarahkan untuk mencapai dukungan legitimasi (otoritas sosial) yaitu meliputi tiga *level* yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku khalayak. Kegiatan komunikasi politik meliputi juga, upaya untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan dukungan politik”.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Komunikasi politik , Prof Dr Anwar Arifin, Balai pustaka. Jakarta-2003

Berdasarkan bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pasangan Nero diantaranya adalah :

- a. Retorika Politik, retorika berasal dari Bahasa Yunani – *rhetorica*, yang berarti seni berbicara, pada awalnya retorika adalah komunikasi yang bersifat dua arah atau dialogis, dalam perkembangannya retorika tidak saja merupakan kegiatan antar personal, tetapi berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa melalui pidato kepada orang banyak. Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara memang memiliki daya persuasif yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara).

Retorika pada dasarnya menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato. Sedang pidato adalah konsep yang sama pentingnya dengan retorika sebagai identifikasi atau sebagai simbolisme. Dengan berpidato kepada khalayak secara terbuka akan berkembang wacana publik dan berlangsung proses persuasi. Melalui pidato dapat terungkap konflik atau konsensus. Itulah sebabnya Dan Nimmo (1989:142) menyebut pidato adalah negoisasi, dengan retorika politik akan tercipta masyarakat dengan negoisasi (konflik dan konsensus) yang terus berlangsung.

Akhirnya keberhasilan pidato politik sangat di tentukan oleh pembicara (komunikator) yang dikenal dengan nama orator atau retor. Sesungguhnya khalayak datang kesuatu rapat umum bukan hanya mau mendengar pidato,

tetapi juga ingin melihat atau bertemu dengan orangnya, ketokohan, kredibilitas dan populeritas seseorang pembicara akan merupakan daya tarik atau daya persuasi sendiri.

b. *Public Relation* Politik

A.J. Hooftman dalam Arifin (198:4-5) menulis *public relations* adalah pelayanan secara sadar dan sistematis untuk keseluruhan dari hubungan-hubungan luar dari suatu badan kemasyarakatan.

Hartono (1966:45) menguraikan bahwa *public relations* adalah fungsi manajemen dengan tugas melakukan penelitian terhadap pendapat, keinginan dan sikap publik, melakukan usaha-usaha penerangan dan hubungan-hubungan untuk saling pengertian, kepercayaan, dukungan dan integrasi dengan publik. *public relations* politik dilakukan, baik kedalam partai politik misalnya (*internal public*) maupun diluar partai politik (*external public*) seperti masyarakat luas.

c. Kampanye politik

“Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Pada umumnya kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara kampanye. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk mobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.

Selain itu kampanye politik adalah sebuah upaya bersama yang terorganisir untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam sebuah kelompok tertentu”<sup>28</sup>.

Dalam demokrasi, kampanye politik selalu dikaitkan dengan pemilihan, dimana para wakil rakyat dipilih atau referendum diputuskan.

#### d. Lobi Politik

Istilah lobi sesungguhnya adalah tempat para tamu menunggu atau berbincang-bincang santai di hotel. Kemudian karena tempat itu banyak dipakai oleh politikus melakukan pembicaraan politik (*political lobbying*) secara santai atau informal, istilah lobi politik itu kemudian melekat sebagai suatu kegiatan politik yang sangat penting. Meskipun pembicaraan politik yang bersifat dialog, tatap muka atau antar pesona tidak lagi dilakukan di lobi hotel, namun kegiatan itu sudah dinamakan lobi politik. Kegiatan tersebut bersifat sangat informal, namun sangat penting karena hasil lobi itu kemudian dapat diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat politik, persidangan dan forum musyawarah, baik di dalam partai politik maupun di parlemen, dan di lembaga politik.

#### e. Pola Tindakan Politik

Sesungguhnya lobi politik, retorika politik dan kampanye politik adalah peristiwa-peristiwa politik yang dapat diamati dari waktu ke waktu, yang dalam waktu lama membentuk pola. Politik yang selalu melakukan lobi politik disebut sebagai pelobi karena tindakan melobi telah terpola dalam dirinya.

<sup>28</sup> Surya Kusuma. *Panduan Sukses Kampanye PEMILU 2009*. Tangerang : Pustaka Cendekiamuda, 2008, hal.24

Sedangkan politikus atau pekerja politik adalah julukan yang diberikan kepada orang yang dalam melakukan waktu lama melakukan pekerjaan politik. Demikian juga politikus yang selalu melakukan retorika politik dan sangat mahir dalam berpidato, dinamakan sebagai *retor* atau *orator*.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali peristiwa politik dan tindakan politik, baik oleh pemerintah dan parlemen, maupun partai politik dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh partai politik misalnya penggunaan seragam, misalnya Partai Golongan Karya (partai Golkar) menggunakan seragam warna kuning; partai demokrasi indonesia (PDIP) memilih seragam warna merah tua; partai persatuan pembangunan (PPP) memakai seragam warna hijau tua; dan partai amanat nasional menggunakan seragam warna biru cerah.

“Sesungguhnya, tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra (*image*) politik bagi khalayak (masyarakat), yaitu gambaran tentang realitas politik yang memiliki makna. Robert (1977) menjelaskan bahwa citra menunjukkan keseluruhan informasi menurut teori informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan dan disimpan oleh individu. Secara umum citra adalah peta seorang tentang realitas. Tanpa citra seseorang akan selalu berada dalam suasana yang tidak pasti, citra adalah gambaran tentang realitas, kendatipun tidak harus selalu sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Citra adalah dunia menurut persepsi kita. Walter Lippman (1965) menyebutnya *pictures in our head*”.<sup>29</sup>

### E.3.3. Media komunikasi

“Media dalam komunikasi politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam penyampaian pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah,

<sup>29</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi-Paradigma-teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*-Balai Pustaka 2003.

buku, media elektronik seperti film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media formal kecil seperti brosur, selebaran, stiker, buletin, media luar ruangan (*out door media*) seperti baliho, rompi, kaos oblong, spanduk, reklame, bendera, pin, logo, gantungan kunci, payung”.<sup>30</sup>

Media juga memiliki fungsi yang besar dalam memberikan informasi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang, juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang, karena efek dilakukan media sebagai alat penyampaian pesan-pesan adalah secara disengaja. Dengan sendirinya masyarakat bisa secara cepat terpengaruh.

“Pada prinsipnya perubahan sikap suatu masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya informasi yang baru, yang diterimanya secara kontekstual sehubungan dengan tuntutan zamannya. Menurut Merrill (2006), misalnya, besar-kecilnya perubahan tersebut memang tergantung kekuatan efek jurnalisme yang ditimbulkan oleh media massa”.<sup>31</sup>

Teori McLuhan, disebut teori perpanjangan alat indra (*sense extension theory*), mengatakan bahwa media adalah perluasan alat indra manusia, telepon adalah perpanjangan telinga dan televisi adalah perpanjangan mata. Seperti Gatot Kaca, yang mampu mendengar dan melihat dari jarak jauh, begitu juga manusia yang menggunakan media massa”.<sup>32</sup>

#### E.3.4. Aktor-aktor yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Pemilihan Kepala Daerah aktor-aktor yang biasa terlibat yaitu KPUD, BAWASLU, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPDP, Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, dan masyarakat Kabupaten Bekasi.

<sup>30</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal.

<sup>31</sup> Wahyu Wibowo. *Pembangunan, Pemberdayaan dan Partisipasi Politik di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol,4 No. 1 2008, hal. 164

<sup>32</sup> Drs.jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2007, hal.220

#### D.4. Partisipasi Politik

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah partisipasi politik masyarakat sangat erat kaitannya dalam pemenangan politik, masyarakat turut serta mengambil andil dan hak suaranya untuk memilih pemimpin sesuai dengan harapan mereka.

“Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin tertentu, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum”.<sup>33</sup>

“Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.<sup>34</sup>

“Menurut Lili Ramli, partisipasi politik merupakan esensi demokrasi, karena penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung Kepala Daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri”.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal. 118

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi*, Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008, hal. 367

<sup>35</sup> Lili Romli.  
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Pilkada dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, No.16/tahun VI Agustus 2005 , hal. 90

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik<sup>36</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka partisipasi politik dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai persaingan dan keberhasilan politik. Dan persepsi-persepsi tentang relevansi politik dan keikutsertaan politik.

#### D.5. *Marketing* Politik

“Dalam demokrasi dimana para kandidat calon presiden, Kepala Daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat serta partai politik tumbuh dan berkompetisi meraih simpati pemilih serta meraih kekuasaan membutuhkan *marketing* politik, ilmu *marketing* akan selalu dibutuhkan sebagai sebuah disiplin, kecuali ditempat dimana kompetisi tidak dibiarkan tumbuh”.<sup>37</sup>

Partai politik dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan membutuhkan *marketing* politik, sebagai sebuah subjek akademis, perkembangan *marketing* politik relatif baru.

“*Marketing* politik adalah ilmu baru yang mencoba menggabungkan teori-teori marketing dalam kehidupan politik. Sebagai cabang ilmu, marketing politik memang bisa dikatakan masih baru, tetapi kehadirannya telah menjadi *trend* dalam ranah politik di negara maju yang menganut demokrasi”.<sup>38</sup>

Partai politik dan para kandidat perseorangan memanfaatkan teori ini untuk strategi kampanye baik untuk mendapatkan dukungan politik dalam pemilihan umum untuk memelihara citra pemilih.

<sup>36</sup> Effendi Hasan. Jurnal Kajian Politik dan Masalah pembangunan . *Partisipasi, kebijakan dan Dinamika Politik*, Vol 7 no.13.2011, hal. 963

<sup>37</sup> Adman Nursal, “*Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan Bbaru Kampanye Pemilihan DPR, DPD*”, Presiden.Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.3

<sup>38</sup> Firmansyah, “*Marketing Politik:Antara Pemahaman dan Realitas*”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007,hal.xx

“Selain itu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ini, tim sukses maupun kandidat harus bisa menarik hati rakyat yang memiliki hak suaranya. Bagaimana tim dan kandidat bisa mempengaruhi hati pemilih, untuk menentukan pilihannya kepada kandidat dari partai politik tertentu. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh tim sukses dan kandidat untuk merebut hati rakyat, *pertama*, bagaimana pemilih loyal tetap bertahan dan kekal bersikukuh atas pilihannya. *Kedua*, bagaimana pemilih mengambang (*swinging voters*) menetapkan pilihannya kepada pasangan calon yang telah dijagokan. *Ketiga*, bagaimana pemilih oposisi membalikkan badannya kemudian mendukung pasangan calon yang tidak disokongnya. Merebut hati rakyat seperti hal tersebut, sangat mungkin terjadi dengan mengandalkan apa yang disebut oleh Bruce Newman dkk. (1999), sebagai *political marketing*. *Political marketing* selain sebagai sebuah metode iapun adalah satu pendekatan baru dalam ilmu politik guna memahami perilaku politik itu sendiri”.<sup>39</sup>

“Nursal mendefinisikan marketik politik sebagai serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sehingga *political marketing* bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimensinya khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu”.<sup>40</sup>

Partai-partai politik maupun kandidat, sekurang-kurangnya harus memiliki konsep marketing politik yang dapat dilakukan melalui beberapa metode yakni :

1. Mengkomunikasikan pesan dan gagasan, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pendukungnya dan para pemilih lainnya.
2. Mengembangkan kredibilitas dan kepercayaan para pendukungnya, para pemilih dan sumber eksternal agar memberikan dukungan finansial dan mengembangkan struktur manajemen di tingkat lokal maupun nasional.

<sup>39</sup> Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 212

<sup>40</sup> Adman Nursal, *Op. Cit.*, hal. 23

3. Berinteraksi dan merespon dengan para pendukung, *influencer*, para legislator, para kompetitor, dan masyarakat umum dalam mengembangkan dan pengadaptasian kebijakan-kebijakan dan strategi.
4. Menyampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* melalui berbagai media, tentang informasi, saran, dan kepemimpinan yang diharapkan atau dibutuhkan dalam negara demokrasi.
5. Menyediakan pelatihan, mengelola dan menganalisis data dan sumber informasi untuk kepentingan kampanye para kandidat, para agen pemasar dan atau aktivis partai.
6. Berusaha mempengaruhi dan mendorong pemilih, media-media dan *influencers* penting lainnya agar secara terus menerus mempengaruhi dan mendorong komunitas untuk mendukung partai politik<sup>41</sup>.

Bentuk-bentuk kampanye maupun proses *marketing* dalam *marketing* politik dilaksanakan untuk mencapai *output marketing* politik yang disebut makna politis. Sebab pada dasarnya *marketing* politik adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih, perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai politik atau kontestan tertentu.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 49-50

Berdasarkan dengan beberapa teori yang digunakan di atas, mengenai strategi komunikasi politik, partisipasi politik, *marketing* politik, media dan beberapa aktor yang terlibat di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi.

Penulis menganggap bahwa sejumlah teori yang dikemukakan memiliki relevansi terhadap tesis yang penulis teliti saat ini, strategi komunikasi di atas menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh tim sukses dan kandidat atau calon Kepala Daerah dalam pemenangan pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin.

Strategi komunikasi politik akan berjalan efektif dan mencapai tujuan politik yang diinginkan, antara lain calon Kepala Daerah dan tim pemenangan diharapkan bisa merawat ketokohan dan kelembagaan, hal ini berkaitan dengan perilaku figur calon agar bisa menarik simpati massa, selain itu kelembagaan dalam hal ini partai politik sebagai kendaraan yang digunakan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus juga bekerja secara kolektif untuk mensosialisasikan figur calon. memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, dan merawat ketokohan dan kelembagaan perlu dilakukan oleh tim pemenangan maupun figur calon guna mencapai tujuan politik yang diharapkan.

Mengenai strategi komunikasi politik, tim pemenangan harus mengemas dengan baik mengenai isu yang diangkat serta visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat, hal ini harus dilakukan oleh tim pemenangan dalam memarketkan

figur calon yang akan dimenangkan dalam pemilihan Kepala Daerah. Selain itu tim pemenangan harus paham betul bentuk-bentuk komunikasi politik yang digunakan dalam memenangkan figur Neneng Hasanah Yasin, agar mampu menarik simpati rakyat untuk menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi sangat penting dalam mencapai tujuan politik. Kemantapan strategi dan kerja tim yang solid sangat berpengaruh terhadap kemenangan NERO, dengan cara tim harus mampu menjual pasangan calon melalui *marketing* politik yang berkualitas sehingga mampu menarik hati masyarakat Kabupaten Bekasi dalam menentukan pilihannya kepada pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja.

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi<sup>42</sup>. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang dengan ragam studi kasus di lihat dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten

---

<sup>42</sup> Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 5

Bekasi, mengenai persoalan pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam pemilihan langsung Kepala Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Studi kasus dilakukan adalah dengan wawancara dan pengumpulan dokumen berkaitan dengan pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.

## E.2. Subyek Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa aktor sebagai menjadi subyek penelitian, diantaranya KPUD Kabupaten Bekasi sebagai lembaga formal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, tim pemenangan Neneng Hasah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, konsituen/masyarakat, dan tokoh masyarakat.

“Pemilihan subyek penelitian juga erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *sampling*, maksud *sampling* dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunan (*contruction*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam *generalisasi*. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks yang unik. Maksud kedua dari *sampling* ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)”.<sup>43</sup>

## E.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian penelitian yang sangat penting, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.224

wawancara dan pengumpulan data atau dokumen yang mendukung kelengkapan penelitian penulis.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, konsituen, tim sukses pemenangan, dan anggota KPUD Kabupaten Bekasi.

Maksud dilakukannya wawancara menurut Lincoln dan Guba (1995:266) yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, motivasi, perasaan, organisasi, tuntutan, dan kepedulian. Yang dimana hal itu, adalah bagian dari maksud dilakukannya wawancara dan sebagai bagian dari bentuk pengumpulan informasi<sup>44</sup>.

Teknik pengumpulan data ini juga disebut sebagai teknik pengumpulan data primer, teknik ini adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, diperoleh melalui pengamatan (*observasi*) terhadap kehidupan sehari-hari dan melalui wawancara, yang merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih.

b. Dokumen

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.186

“Dokumen menurut Lincoln dan Guba ialah setiap bahan tertulis atau film, dokumen juga digunakan sebagai bukti untuk pengujian. Teknik ini juga dinamakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari riset kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data yang diperoleh dari kajian dan sumber bawaan melalui buku literatur, referensi bacaan dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua sumber data yang sudah ada akan dijadikan dokumen dalam menunjang kelengkapan data penelitian”.<sup>45</sup>

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen, seperti adanya jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi dari KPUD Kabupaten Bekasi, dokumentasi atau foto pada pelaksanaan Pemilukada, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, dll.

#### **E.4.Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif (Bodgan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah data yang akan dikelola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, proses berjalannya analisis data (Seiddel, 1998) adalah sebagai berikut :

- a). Mencatat hasil catatan lapangan, dan diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri
- b). Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

- c). Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

#### E.5. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu "Pendahuluan" berisi mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian.

Bab II "Gambaran Umum" Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Kabupaten Bekasi, Gambaran umum kabupaten bekasi meliputi sejarah singkat Kabupaten Bekasi, kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, dan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Bekasi.

Bab III tentang "Kemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Bekasi tahun 2012" bab ini beisikan lebih kepada faktor-faktor kemenangan Neneng Hasanah Yasin, di antaranya membahas tentang marketing politik : faktor *marketing* politik yang dilakukan tim pemenangan, mobilisasi mesin partai, dan pengaruh figur calon.

Bab IV "Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi" bab III ini memuat serangkaian strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin, yaitu beisikan visi misi calon, perolehan suara pasangan calon, dan strategi pemenangan.

Bab V "Kesimpulan" berisi kesimpulan materi yang ada dalam penulisan tesis yang penulis susun sebagai syarat akhir kelulusan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI

#### A. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Bekasi

“Dalam catatan sejarah, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas. Menurut Poerbatjaraka seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan. Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi *Bekasi* hingga kini”.<sup>46</sup>

“Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmains, yang menentang keberadaan RIS-Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950. Menyampaikan tuntutan rakyat Bekasi yang berbunyi:

Pertama, Penyerahan kekuasaan pemerintah federal kepada Republik Indonesia. Kedua, Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia. Ketiga, tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia. Keempat, Menuntut kepada Pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi”.<sup>47</sup>

“Upaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta. Pengajuan usul dilakukan tiga kali antara bulan Februari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujui penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi "Kabupaten Bekasi".<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Profil Kabupaten Bekasi dimuat dalam website :<http://www.bekasikab.go.id>

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya undang-undang No. 14 Tahun 1950. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi.<sup>49</sup>

## B. Kondisi Geografis dan Demografis kabupaten Bekasi

### B.1. Kondisi Geografis

Secara Geografis, wilayah Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terbagi atas 23 Kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan.

Batas admistrasi wilayah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

Utara	: Laut Jawa
Selatan	: Kabupaten Bogor
Barat	: DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Timur	: Kabupaten Karawang

Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten, adapun luas wilayah dan jumlah desa per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>49</sup> *Ibid*

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Ha	%	
1	Setu	6.216	4,88	11
2	Serang Baru	6.380	5,01	8
3	Cikarang Pusat	4.760	4,06	6
4	Cikarang Selatan	5.174	3,74	7
5	Cibarusah	5.039	4,03	7
6	Bojongmangu	6.006	4,21	6
7	Cikarang Timur	5.131	3,40	8
8	Kedungwaringin	3.153	3,96	7
9	Cikarang Utara	4.330	4,71	11
10	Karang Bahagia	4.610	2,48	8
11	Cibitung	4.530	3,62	7
12	Cikarang Barat	4.369	3,56	11
13	Tambun Selatan	4.310	3,38	10
14	Tambun Utara	3.442	2,70	8
15	Babelan	6.360	4,99	9
16	Tarumajaya	5.463	4,29	8
17	Tambelang	3.791	5,27	7
18	Sukawangi	6.719	2,98	7
19	Sukatani	3.752	2,95	7
20	Sukakarya	4.240	3,33	7
21	Pebayuran	9.634	7,56	13
22	Cabangbungin	4.970	3,90	8
23	Muaragembong	14.009	11,00	6
<b>Kabupaten Bekasi</b>		<b>127.388</b>	<b>100</b>	<b>187</b>

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007

## B.2. Kondisi Penduduk

“Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pertanggal 07 Februari 2012 adalah sebesar **2.656.601** jiwa dengan kepadatan penduduk **1.747** jiwa per  $\text{Km}^2$  bertambah 1 % bila di bandingkan tahun 2010 dengan jumlah penduduk **2.630.401** jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar **1.722** jiwa per  $\text{Km}^2$ . Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Tambun Selatan yaitu sebesar **418.316** jiwa dengan tingkat kepadatan **8.690** jiwa per  $\text{Km}^2$ , sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Muaragembong yang hanya sebesar **282** jiwa per  $\text{Km}^2$  dan Kecamatan yang jumlah

penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 29.181 jiwa”.<sup>50</sup>

### B.3. Kondisi Ekonomi

“Sebagai daerah yang sangat dekat dengan DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi memiliki berbagai potensi ekonomi sebagai potensi unggulan daerah sektor industri, perdagangan, jasa, sumber daya manusia, modal yang tersebar diberbagai wilayah dan sumber daya alam meliputi pertanian, pertambangan dan pariwisata, di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi 14,04 % terhadap PDRP di Provinsi Jawa Barat. Penyumbang paling besar PDRP Kabupaten Bekasi adalah sektor industri, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, bank dan lembaga keuangan lainnya serta pertanian”.<sup>51</sup>

### B.4. Sarana Prasarana

Kondisi sarana prasarana Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari aspek transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, sarana dan prasarana dasar pemukiman, listrik dan energi.

“Kabupaten bekasi memiliki dua sistem pengendalian banjir yaitu : (1) Sistem *Flood Way* Cikarang Bekasi Laut (CBL) dimulai dari Bendungan CBL pada Kali Cikarang mengalir ke arah barat menampung aliran Kali Cikarang, Kali Sedang, Kali Jambe dan Kali Bekasi. (2) Sistem *Flood Way* Cilemahabang – Ciherang yaitu mulai dari Bendungan Lemah Abang menampung aliran Kali Cilemahabang, Kali Wulu, Kali Beureum dan Cipagadungan. Kondisi kedua pengendali banjir tersebut saat ini kurang baik karena sudah mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga menimbulkan banjir hampir setiap tahun di 15 (lima belas) Kecamatan di Wilayah Utara Kabupaten Bekasi”.<sup>52</sup>

“Jaringan irigasi teknis terbesar adalah di Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur dengan cakupan pelayanan seluas 51.348 Ha. Kondisi jaringan tersebut

<sup>50</sup> Data sosialisasi KPUD Kabupaten Bekasi terkait visi misi, dan kondisi Daerah Kabupaten Bekasi, serta visi misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2012, hal.6

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

36% baik, 35% rusak ringan dan sisanya 29% rusak berat. Kewenangan pengolahan Daerah Irigasi tersebut sesuai amanat Undang-undang SDA nomor 7 Tahun 2004 menjadi kemenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Citarum dan Perum Jasa Tirta II".<sup>53</sup>

Kerawanan air bersih terdapat di lima belas Kecamatan di Kabupaten Bekasi, sumber kerawanan tersebut diantaranya yaitu tidak tersedianya sumber air baku permukaan setiap saat (tergantung pada musim), belum optimalnya pelayanan PDAM dan kondisi air di wilayah tersebut kurang bagus.

Pelayanan air minum untuk penduduk Kabupaten Bekasi diselenggarakan oleh PDAM Bekasi yang saat ini melayani dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten terdapat 10 (sepuluh) cabang/unit pelayanan dengan kapasitas total terpasang 555 liter/detik. Sumber air baku untuk penyediaan air minum berasal dari air permukaan yaitu dari saluran Tarum Barat<sup>54</sup>. Sedangkan sarana kebersihan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Burangkeng Kecamatan Setu.

### **C. Pembangunan Kabupaten Bekasi dari Masa ke Masa**

Sebelum dilaksanakannya, Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) tahun 1969 - 1974 kondisi daerah Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, sedangkan keadaan masyarakat sangat tertinggal dan miskin, lebih dari itu kondisi

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

infra struktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, listrik, bahkan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat minim.

Dengan demikian, pilihan prioritas untuk memulai pembangunan menjadi cukup sulit pada awal dasawarsa enam puluhan pemerintah pusat memulai pembangunan saluran induk Tarum Barat sebagai bagian dari jaringan irigasi Jatiluhur. Pekerjaan tersebut diawali dengan pembuatan saluran primer, kemudian saluran-saluran sekunder dan terakhir saluran-saluran tertier. Sebagian besar dilakukan dengan pola padat karya, sehingga sekaligus bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

“Memasuki tahapan pembangunan 5 (lima) tahun pertama, yaitu semasa kepemimpinan Bupati M. Soekat Soebandi, Pemerintah Pusat mulai meluncurkan bantuan berturut-turut; tahun 1969 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa Rp.100.000,- per desa, tahun 1970 berupa Inpres bantuan prasarana jalan dan jembatan Rp. 50,- per kapita, tahun 1972 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan tahun 1973 disusul pula dengan Inpres Bantuan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Kesehatan. Pada tahun 1971 telah dibentuk pula Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) Bekasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1/1971, yang sekarang dikenal sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi”.<sup>55</sup>

Tahapan pembangunan lima tahun kedua dan ketiga praktis sepenuhnya di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Fatah. Pada masa itu seluruh pekerjaan jaringan Irigasi Tarum Barat telah rampung dan dapat mengairi secara teknis dan setengah teknis areal pesawahan seluas 30.000 Ha, dari luas keseluruhan 87.000 Ha. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula Program Bimas, Inmas, Inmum, Insus, dan pencetakan sawah yang disertai dengan pemberian kredit usaha tani.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

Hasilnya setiap tahun Daerah Kabupaten Bekasi mengalami surplus gabah, sehingga dapat menyumbang stock nasional dan sekaligus mendudukkannya menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat.

Mulai tahun 1974 dikembangkan pula kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam sistem Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian. Dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, investasi disektor industri dan permukiman, baik PMA, PMDA, maupun swasta nasional menjadi luas, sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang besar bagi masyarakat. Kedua momentum pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pimpinan Daerah Abdul Fatah, sehingga pendapatan daerah melonjak tajam dan seiring dengan itu kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pada masa itu dibangun kantor pemerintah daerah yang baru di Jalan A. Yani No. 1 Bekasi, dibangun pula stadion, gedung olahraga dan monumen daerah, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pembangunan infra struktur pun berlangsung amat cepat. Hasilnya berbagai kondisi tersebut saling bersinergi satu sama lain sehingga kiprah pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat.

Terkenal pada saat itu motto pembangunan yang dicanangkan Bupati Abdul Fatah, setitik air dan sejengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Setelah selesai pengabdian dipemerintahan, Abdul Fatah melanjutkan pengabdian di masyarakat dengan memimpin Yayasan

Pendidikan Islam Empat Lima dan mendirikan Universitas Islam 45 (UNISMA). Tahapan Pembangunan Lima tahun keempat dan kelima bertepatan dengan masa kepemimpinan Bupati Suko Martono.

Pada masa itu, pembangunan disektor pertanian tetap signifikan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan pula kepada sektor industri dan pemukiman. Disamping itu perhatian yang besar juga dilakukan terhadap sektor perpasaran, yakni dengan melakukan renovasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta memfasilitasi pembangunan disektor keagamaan ditandai secara monumental dengan pembangunan *Islamic Centre* dan pendirian Yayasan Nurul Iman yang sampai saat ini dikelola Abdul Fatah.

“Tahap pembangunan lima tahun keenam bertepatan dengan kepemimpinan Bupati Mochammad Djahhari yang memulai kiprah pembangunannya dengan motto *"Back to Village"* (kembali kedesa) dengan mengadakan berbagai proyek-proyek percontohan disektor pertanian. Disamping itu kepada para investor perumahan dikenakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dasar dan lahan tempat pemakaman umum. Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi mendorong Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi”.<sup>56</sup>

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Ibukota di Bekasi meliputi luas wilayah 21.000 Ha lebih terdiri atas 7 kecamatan, yakni : Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatiasih, Pondok Gede dan Bantargebang.

“Bupati Wikanda Darmawijaya memimpin Kabupaten Bekasi menjelang dan memasuki masa reformasi. Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka sistem

---

<sup>56</sup> *Ibid*

pemerintahan daerah berubah, sehingga menempatkan DPRD di luar pemerintah daerah, bahkan menjadi mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan secara lebih otonom<sup>57</sup>.

Pada masa transisi seperti ini euforia demokratisasi dan kebebasan cenderung mengemuka, namun berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah semua itu dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bersama DPRD tekad Bupati Wikanda Darmawijaya untuk membangun Daerah Kabupaten Bekasi yang bernuansa agamis dapat dirumuskan dengan visi "Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agri Bisnis dan Industri Berkelanjutan". Wujud aplikasinya ditandai dengan mengembangkan program posyandu unggul, penghapusan lahan prostitusi "Malvinas" yang dialihkan pemanfaatannya untuk bangunan rumah sakit daerah dan pembangunan masjid, juga pemberantasan buta huruf Al-Quran.

Pada masa kepemimpinan Bupati Wikanda Darmawijaya tersebut, Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mulai dilaksanakan. Pada saat mengakhiri masa jabatannya Wikanda telah berhasil membangun Gedung DPRD dan bangunan induk gedung Kantor Pemerintah Daerah serta bangunan perlengkapannya berupa masjid di desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.

Pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni Saleh Manaf. Bahkan pada masa itu gedung-gedung tersebut mulai difungsikan, sehingga praktis pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi mulai dikendalikan dan pusat

---

<sup>57</sup> *Ibid*

pemerintahan yang baru ini. Bersamaan dengan itu gedung-gedung pusat pemerintahan yang lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan imbalan sejumlah dana yang dibayarkan secara angsuran.

Pada masa pemerintahan Bupati Saleh Manaf juga terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2004 , tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi.

Kepemimpinan Bupati Saleh Manaf dan Wakil Bupati Solihin Sari hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak diberhentikannya kedua pejabat tersebut telah diangkat Tenny Wishramwan sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini sedang dilaksanakan berbagai persiapan dalam rangka pemilihan Kepala Desa pada 165 desa.

“Sementara itu dengan selesainya proses hukum yang berkaitan dengan pemberhentikan kedua pejabat tersebut telah selesai maka selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif dapat diselenggarakan”.<sup>58</sup>

Selanjutnya kepemimpinan Sa'duddin pada masa kepemimpinan Sa'dudin banyak hal yang telah dilakukan olehnya, diantara perbaikan beberapa jalan-jalan yang rusak yang berada di beberapa tempat di Kabupaten Bekasi. Baginya, daerah harus tetap mempertahankan sektor pertanian karena potensi di sektor itu sangat

---

<sup>58</sup> *Ibid*

besar, selain itu Kabupaten Bekasi masih dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat.

Pembangunan di sektor industri, Sa'dudin mengakui tak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pembangunan di sektor industri diarahkan sebagai industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta periode selanjutnya oleh Bupati Neneng Hasanah Yasin yang telah memenangkan Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012.

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN NENENG HASANAH YASIN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012**

Pada bab ini akan membahas analisis faktor kemenangan Neneng Hasanah Yasin pada Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012, dan relevansinya dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terlebih dahulu akan dipaparkan perjalanan pelaksanaan Pemilukada langsung di Indonesia dan gambaran singkat kasus Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012.

#### **A. Perjalanan Pemilukada Langsung di Indonesia**

Pemilukada adalah panggung demokrasi di tingkat lokal, semangat dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung dengan konsep perwakilan di era sebelumnya, yang mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum dipilih oleh DPRD. Saat ini pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokrasi secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilukada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Rakyat menjadi penentu proses peralihan kekuasaan dimana ini merupakan inti dari demokrasi, rakyat memiliki hak pilih secara langsung menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan keinginan mereka.

“Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 sampai dengan 119, dimana dalam Pasal 56 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.<sup>59</sup>

Pemilukada secara langsung yaitu telah meletakkan aspirasi publik sebagai kerangka awal dalam pengembangan dan penumbuhan demokrasi, lahir dari realitas akar rumput. Realitas suara akar rumput sering kali dianggap sebagai bentuk manifestasi dari aspirasi publik secara riil, juga dianggap sebagai parameter dari pengembangan dan penumbuhan demokrasi.

Melalui dialektika yang panjang, pada pertengahan tahun 2005 ini ketangguhan dari ‘proyek politik’ pemerintahan Indonesia Bersatu akan diuji. Berdasarkan catatan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kurang lebih 224 daerah di seluruh Indonesia yang akan menggelar pemilu domestik (*local election*), daerah-daerah itu antara lain terdiri atas 11 provinsi, 178 kabupaten, dan 35 kota.

Pelaksanaan Pemilukada langsung (Pemilukada) tersebut akan digelar pada daerah yang masa jabatan kepala daerahnya yang telah dan akan berakhir antara Oktober 2004 hingga Maret 2005. Kerentanan akan munculnya konflik-konflik domestik di berbagai daerah dalam menghadapi arus Pemilukada langsung tersebut sulit untuk dihindari. Kemungkinan-kemungkinan konflik domestik bisa lahir ketika proses demokrasi akan segera dibangun.

---

<sup>59</sup> Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 91

Konflik domestik yang terjadi pada berbagai *level* dan segmen masyarakat, yang bersumber dari kelompok-kelompok masyarakat akan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan ruang dan pengembangan kebudayaan politik demokratis.

Perhelatan akbar politik lokal ini, penanganannya lebih berat dan berkecenderungan besar untuk menimbulkan konflik horinzontal masyarakat lokal pada daerah diadakannya Pemilukada tersebut. Kekhawatiran ini berangkat dari bobot pemilu domestik itu sendiri, karena pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) ini, yang berkompetisi adalah elit-elit politik lokal yang memiliki ikatan emosional yang intim (atau paling tidak merasa intim) dengan para konstituennya, terlebih jika pada pelaksanaannya nanti isu-isu kesukuan, agama, ras, kelompok serta isu-isu *black campaign* dimainkan oleh tim sukses pada masing-masing kandidat.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah, akan adanya mobilisasi massa besar-besaran oleh beberapa kelompok yang berkompetisi, jika tidak diantisipasi sejak awal dapat berakhir *chaos*. Jangankan calon resmi, pihak yang baru menjadi bakal calon, lantas tersisih dalam verifikasi, sangat mungkin sengaja memicu konflik karena kecewa. Maka sangat jelas ini akan menjadi persoalan besar jika tidak disiapkan secara matang, mengingat paling tidak ada 224 daerah propinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia yang menggelar pemilihan langsung kepala daerahnya.

Karenanya perlu dibuat suatu langkah-langkah tepat untuk mereduksi kemungkinan terjadinya konflik tersebut melalui upaya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai serba-serbi pelaksanaan Pemilu pada langsung nanti. Dan sebaiknya proses sosialisasi secara serius bukan hanya kepada kalangan pejabat, tapi juga langsung ke lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), partai politik yang mempunyai basis massa riil di tingkat lokal dan *multi-stakeholders* lainnya.

Pelibatan *multi-stakeholders* diatas dalam Pemilu pada secara langsung di daerah-daerah merupakan langkah strategis dan penting untuk dilakukan, paling tidak ada dua kepentingan yang dapat ditumbuhkan dari pelibatan tersebut antara lain : (1) kepentingan jangka pendek, yakni mengupayakan kesadaran masyarakat di daerah tersebut agar dapat berpartisipasi dalam perhelatan politik lokal di daerahnya, dengan cara-cara yang elegan dan demokratis. Pertimbangan ini berangkat dari teori-teori sosial yang ada, bahwasannya kultur pada masyarakat tradisional (biasanya) sangat kental akan budaya *patromonialisme* sehingga sangat besar kemungkinan, himbuan dan pesan-pesan bijak yang disampaikan oleh para ulama/tokoh agama lainnya, tokoh-tokoh masyarakat adat serta *stakeholders* lainnya dapat diikuti oleh masyarakat di daerah setempat. sementara itu, (2) kepentingan jangka panjangnya adalah dalam rangka pemberdayaan dan peran pendidikan kewarganegaraan (*civil education*). Untuk itu, pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi, adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar.

Pada dasarnya, pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan. Tanpa itu semua, jangan harap Pemilukada secara langsung akan tercipta dengan kualitas yang baik. Untuk itu, sejak awal harus ada panduan yang jelas bagi massa pemilih lokal, bagaimana harus menjalankan Pemilukada secara langsung dengan baik.

Langkah-langkah sederhana dan murah dalam rangka sosialisasi *massif* ini adalah dengan memanfaatkan media informasi, seperti radio lokal, pamflet, leaflet, dan sarana informasi lainnya. Selain itu pertemuan pada balai desa dan tempat-tempat pertemuan lainnya dalam rangka sosialisasi, cukup efektif. Tentunya, komponen terpenting adalah keterlibatan secara aktif komunitas akar rumput.

Dari ketakutan dan rasa khawatir tersebut, pelaksanaan pemilihan langsung yang ada di Indonesia hingga saat ini, di anggap berhasil sebagai bentuk Negara yang demokratis, yaitu masyarakat bisa menentukan sendiri daerahnya sendiri dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan harapannya, meskipun terkadang dalam pelaksanaannya Pemilihan langsung ini sering dinodai dengan adanya *money politic* secara tidak langsung hal tersebut bisa menodai hakekat dari negara yang bersih, jujur, dan adil. Akan tetapi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam penetapan pelaksanaan Pemilukada secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan pemilihan Kepala Daerah melalui sistem perwakilan atau ditentukan oleh DPRD.

“Menurut Lili Romli, pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki sejumlah kelebihan bila dibandingkan melalui sistem keterwakilan. Kelebihan tersebut antara lain: (i) memutus politik oligarki yang dilakukan sekelompok elite dalam penentuan Kepala Daerah; (ii) memperkuat *checks and balances* dengan DPRD; (iii) legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat; (iv) menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel; (v) menghasilkan Kepala Daerah yang lebih peka dan *responsif* kepada tuntutan rakyat”<sup>60</sup>.

Sejalan dengan itu, demokratisasi politik di tingkat lokal adalah sebuah proses perubahan politik yang mempunyai dua sisi<sup>61</sup>, yaitu sisi pertama, demokratisasi adalah sebagai kekuatan perubahan melahirkan kemajuan-kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan. Sisi kedua sebaliknya, demokratisasi juga dapat melahirkan kemunduran bahkan kehancuran bagi sistem demokrasi itu sendiri.

Pada prinsipnya, Pemilukada memberikan harapan bagi rakyat, karena dalam pelaksanaan Pemilukada langsung (khususnya) rakyat tidak hanya menjadi penonton tapi juga ikut menentukan masa depan mereka, juga masa depan daerahnya. Melalui Pemilukada filosofi kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dan merupakan ekspresi paling nyata dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Di samping itu, Pemilukada langsung adalah pemenuhan prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik. Sesuai dengan asas pemilihan umum di dalam konstitusi, maka undang-undang harus memastikan bahwa pemenuhan partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

<sup>60</sup> Lili Romli. *Democracy Pilkada*, Jakarta : LIPI, Pusat Penelitian Politik, 2007, hal. 1

<sup>61</sup> TB. Massa Djafar, *Demokratisasi: DPRD dan Masalah Penguatan Politik Lokal*, Jurnal politik Vol 3/No.2 tahun 2007, hal. 52

## B. Kontroversi Kasus Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012

"Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, menetapkan pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah setempat. "Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari 23 kecamatan Kabupaten Bekasi, Neneng-Rohim (Nero) memperoleh 442.857 suara atau setara dengan 41,06 %," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila, usai Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di kantor KPU setempat, pada hari Kamis, 15 Maret 2012 pukul 22:44 WIB".<sup>62</sup>

Sementara itu, perolehan suara di tingkat kedua diraih pasangan Sa' duddin dan Jamalulail Yunus (SAJA) memperoleh 331.638 (30,75 persen). Pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat) berada di urutan terakhir dengan perolehan 304.108 suara (28,19%). "Hasilnya sudah jelas, pasangan nomor urut satu, Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja (NERO) yang tampil sebagai pemenang". Dikatakan Adi ketua KPUD Kabupaten Bekasi tersebut, pengumuman pemenang Pemilukada Kabupaten Bekasi memang lebih cepat dari yang semula dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2011. Hal itu dikarenakan proses rekapitulasi suara yang telah rampung di tingkat kecamatan lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Jadwal diatur demikian karena semula dikhawatirkan rekapitulasi memakan waktu lama hingga batas maksimal, yakni tiga hari. Kalau sekarang pun beres, kenapa harus ditunda lagi.

Adi menambahkan, pihaknya membuka kesempatan bagi pihak yang merasa keberatan dengan penetapan itu untuk memproses materi gugatan yang

---

<sup>62</sup><http://www.antaraneews.com/berita/301595/kpu--neneng-rohim-pemenang-pilkada-kabupaten-bekasi>, di unduh tanggal 1 Maret 2012

diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena pemenang sudah ditetapkan hari ini, mulai besok, Senin, dan Selasa, pengajuan gugatan sudah dapat dilakukan. Rapat pleno tersebut turut dihadiri perwakilan dari masing-masing tim sukses, Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu, dan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat.

Pasangan Sa`duddin dan Jamalulail Yunus (SAJA) dan Pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (DAHSYAT), mengajukan gugatan atas kemenangan Neneng` Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO), karena mereka menganggap kemenangan Neneng Hasanah Yasin bermuatan politik uang atau *Money politic*, akan tetapi dalam perjalanannya pasangan dengan nomor urut dua Pasangan Sa`duddin dan Jamalulail Yunus (Saja) dan dengan nomor urut tiga Pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat), tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut, sehingga MK memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak ditolak karena tidak bisa membuktikan hal tersebut. Sehingga kemenangan dengan suara terbesar yang diperoleh Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO) dinyatakan sah.

### **C. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (NERO)**

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah, konsituen (masyarakat) yang memiliki hak pilih, suara mereka sangat menentukan keberhasilan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam suksesi sebagai Kepala Daerah. Kandidat yang menghasilkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Setiap masyarakat

berhak menentukan masa depan daerahnya sendiri melalui keterlibatan mereka dalam pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung.

Karena pada prinsipnya, momentum besar yang menjadi bagian dari terwujudnya masyarakat yang berdaulat adalah kedaulatan warga Negara Indonesia dalam partisipasi secara aktif menentukan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka secara langsung. Oleh karena itu, kemantapan strategi pemenangan tim sangat penting dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam strategi pemenangan yang dilakukan oleh tim sukses calon, adanya komunikasi yang efektif, tepat dan efisien perlu dilakukan dalam mensosialisasikan figur calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menarik masyarakat yang memiliki hak suaranya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai target-target yang dituju agar kemenangannya bisa diraih.

Kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan tercapai tergantung dari bagaimana cara setiap tim sukses mensosialisasikan dan bekerja semaksimal mungkin dalam mengambil hati masyarakat untuk memilih sesuai dengan yang diharapkan. Kemenangan akan tercapai dari bagaimana tim sukses membuat strategi pemenangan yang berkualitas dan bagaimana cara memarketkan calon dengan baik secara maksimal, sehingga masyarakat yang memiliki hak suaranya bisa menjatuhkan hati mereka untuk memilih calon sesuai dengan harapan kita.

Dari itu, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, dapat dilihat secara jelas tabel dibawah ini, terkait dengan jumlah pemilih

yang berhak turut serta dalam menggunakan hak pilihnya (hak suaranya) dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Tabel.3.1  
Rekapitulasi Jumlah pemilih Kecamatan  
Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012  
Kabupaten Bekasi

No	KECAMATAN	Jumlah Pemilih			Jumlah PPS	Jumlah TPS	Keterangan
		L	P	L+P			
1	Babelan	73,356	72,073	145,429		291	
2	Bojongmangu	9,605	9,734	19,339		40	
3	Cabangbungin	18,767	18,678	37,445		85	
4	Cibarusah	26,637	25,933	52,570		108	
5	Cibitung	64,479	62,624	127,103		281	
6	Cikarang Barat	57,704	56,226	113,930		274	
7	Cikarang Pusat	18,900	18,933	37,833		100	
8	Cikarang Selatan	39,388	37,576	76,964		178	
9	Cikarang Timur	32,886	32,412	65,298		143	
10	Cikarang Utara	68,150	66,076	134,226		301	
11	Karang Bahagia	34,184	33,704	67,888		152	
12	Kedung Waringin	21,877	21,265	43,142		85	
13	Muara Gembong	14,658	14,330	28,988		59	
14	Pebayuran	36,320	35,823	72,143		181	
15	Serang Baru	34,722	34,298	69,020		139	
16	SETU	37,635	37,415	75,050		162	
17	Sukakarya	17,566	17,609	35,175		84	
18	Sukatani	27,257	26,978	54,235		126	
19	Sukawangi	16,504	16,313	32,817		63	
20	Tambelang	13,776	13,765	27,541		61	
21	Tambun Selatan	130,717	132,562	263,279		608	
22	Tambun Utara	45,809	45,524	91,333		186	
23	Tarumajaya	38,125	37,290	75,415		199	
		<b>879,022</b>	<b>867,141</b>	<b>1,746,163</b>		<b>3,906</b>	

Sumber diperoleh berdasarkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, dengan nomor surat :154/KPU-Kab-011.329000.XII/2011

“Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perolehan suara terbanyak pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi dimenangkan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, dengan memperoleh suara sah sebanyak **442.857 suara** dengan presentase **41,06%** dari **1.078.603 suara**. Sedangkan Pasangan Sa’duddin dan Jamal Lulail yang di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sah sebanyak **331.638 suara** dengan presentase **30,75 %** dari **1.078.603 suara**. Dan pasangan dengan nomor urut tiga yaitu pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti yang di usung dari PDI

Perjuangan, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PBB, Partai Gerindra, PBR, dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak 304.108 suara dengan presentase 28,19 % dari 1.078.603 suara”.<sup>63</sup>

Kemenangan pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja berdasarkan dari hasil suara yang didapat oleh pasangan tersebut. Hal itu sangat ditentukan dari bagaimana tim sukses gabungan yang dibentuk oleh masing-masing partai politik yang mengukung pasangan tersebut yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Juga adanya keterlibatan relawan dalam bekerjasama menjual sosok figur calon.

Hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilukada tahun 2012 tersebut di atas, dapat dilihat secara terperinci di dalam tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel.3.2**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara**  
**Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati**  
**Tingkat Kabupaten Bekasi**

**a. Suara Sah**

NO	KECAMATAN	Perolehan Suara Sah Untuk Pasangan calon Bupati & Wakil Bupati		
		Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Minteraja, S.Sos	Dr.H.Sa'duddin, MM dan Dr.H. Jamal Lulail	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE
1	Babelan	35,388	33,508	13,066
2	Bojongmangu	7,360	2,323	5,049
3	Cabangbungin	10,494	7,253	6,293
4	Cibarusah	11,252	9,630	13,911
5	Cibitung	22,588	31,281	17,100
6	Cikarang Barat	29,314	19,974	18,722
7	Cikarang Pusat	8,985	6,852	8,885
8	Cikarang Selatan	15,175	6,600	22,199
9	Cikarang Timur	18,120	11,545	16,609

<sup>63</sup>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 29/Kpts/KPU Kab\_011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012

10	Cikarang Utara	29,691	22,340	23,288
11	Karang Bahagia	19,016	12,924	10,984
12	Kedung Waringin	15,167	5,835	7,250
13	Muara Gembong	7,753	4,668	5,339
14	Pebayuran	30,632	9,637	10,620
15	Serang Baru	18,224	9,379	20,619
16	SETU	14,910	11,835	24,761
17	Sukakarya	11,635	6,316	5,162
18	Sukatani	16,909	10,334	6,559
19	Sukawangi	9,268	7,486	7,476
20	Tambelang	6,703	4,467	7,175
21	Tambun Selatan	54,764	60,182	28,688
22	Tambun Utara	21,318	21,636	18,262
23	Tarumajaya	28,164	15,633	6,091
<b>Jumlah Akhir Suara Sah</b>		<b>442,857</b>	<b>331,638</b>	<b>304,108</b>
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati &amp; Wakil Bupati</b>				<b>1,078,603</b>

*Sumber diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi*

#### b. Suara Tidak Sah

**Tabel.3.3**

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Babelan	2,369
2	Bojongmangu	216
3	Cabangbungin	409
4	Cibarusah	1,043
5	Cibitung	2,893
6	Cikarang Barat	2,461
7	Cikarang Pusat	663
8	Cikarang Selatan	1,288
9	Cikarang Timur	1,161
10	Cikarang Utara	2,717
11	Karang Bahagia	1,259
12	Kedung Waringin	722
13	Muara Gembong	372
14	Pebayuran	1,161
15	Serang Baru	1,400
16	SETU	1,651
17	Sukakarya	594
18	Sukatani	1,030
19	Sukawangi	523
20	Tambelang	471

21	Tambun Selatan	
22	Tambun Utara	6,527
23	Tarumajaya	1,828
<b>Jumlah Akhir Suara Tidak Sah</b>		<b>1,278</b>
		<b>34,036</b>

*Sumber diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi*

Melihat secara *detail* rincian hasil rekapitulasi suara yang telah di dapat masing-masing pasangan calon, pasangan dengan nomor urut satu Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja unggul dengan memperoleh suara dengan jumlah **442.857** suara dengan presentase **41,06 %** dari **1.078.603** suara. Dari hal tersebut, penulis lebih menekankan penelitian ini dipusatkan pada sosok figur Neneng Hasanah Yasin yang saat ini maju sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2012.

Pemenangan tersebut tidak terlepas dari bagaimana kerja tim pemenangan dalam mensosialisasikan figur Neneng Hasanah yasin kepada konsituen (masyarakat) yang memiliki hak suara. Dalam hal ini, tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin yang terdiri dari tim gabungan Partai Politik, antara Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) pastinya mempunyai strategi politik yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. untuk mensukseskan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi.

#### **D. Faktor Kemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi**

Kemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012, banyak faktor yang menunjang keberhasilannya menjadi

Bupati di Kabupaten Bekasi dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2012. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan :

#### **D.1. Faktor Figur Calon**

##### **D.1.1. Faktor Figur Neneng Hasanah Yasin**

Sejak Kabupaten Bekasi berdiri pada 60 tahun lalu, Neneng mencetak sejarah. Dialah satu-satunya Bupati Bekasi pertama dari kalangan perempuan. Karena itu, pantas saja, perempuan yang masih aktif sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat ini pada masa pencalonannya sebagai Bupati Bekasi tahun 2012, tidak hanya bangga dan bahagia karena persoalan *gender* tidak menghalangi mimpinya memimpin tanah kelahirannya. Bahkan, usianya terbilang paling muda di antara bupati-bupati Bekasi sebelumnya.

Saat ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada 2012 oleh KPUD Kabupaten Bekasi pada 15 Maret, usia Neneng baru beranjak 31 tahun. Kendati tergolong muda sebagai pemimpin daerah tingkat dua, ia mengaku optimis sanggup merumuskan dan mencari solusi dari setiap persoalan yang ada di daerah yang terkenal dengan kawasan industrinya itu.

Perjalanan Neneng untuk memenangkan Pemilukada 2012 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih pada ajang pertarungan pesta demokrasi di Kabupaten Bekasi pada Pemilukada tahun 2012, istri dari Almaida Rosa Putra itu juga menghadapi dua lawan tangguh yang merupakan

*incumbent*. Namun, buah hati pasangan Mochamad Yasin dan Herlani itu berhasil mengungguli dua rivalnya dengan memperoleh kemenangan telak. Dari 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Neneng mampu meraup suara dominan di 15 kecamatan.

“Perjalanan di saat Pemilukada penuh tawa dan tangis haru. Neneng mengaku “Saya sangat menikmati saat bertemu dengan masyarakat Bekasi dan mendengar keluhan mereka. Ternyata di Bekasi masih banyak yang mesti dibenahi. Dan, Alhamdulillah saya hanya mengalami sakit radang tenggorokan karena sehari melakukan pertemuan 8 sampai 14 kali,” ungkapnya”.<sup>64</sup>

Bupati terpilih yang juga dokter ini mengaku memiliki target untuk 100 hari pertama nanti. Dari sekian banyak yang menjadi sasaran pembenahan, di antaranya ialah menginventarisir kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), revitalisasi RSUD, revitalisasi Puskesmas serta pemberdayaan UKM dan koperasi.

Sedangkan target jangka panjang, beberapa hal yang ia prioritaskan seperti infrastruktur jalan, mengoptimalkan peran kawasan industri, memberikan bantuan sosial untuk RT dan RW, guru ngaji, imam khotib dan juga marbot masjid.

Selanjutnya Neneng mengatakan :

“Di tahun-tahun berikutnya secara berkesinambungan, kita juga akan benahi di bidang pertanian dengan memperbaiki sarana irigasi supaya

<sup>64</sup> Wawancara dilakukan di rumah kediaman Neneng Hasanah Yasin alamat: Jl. Raya Pabayuran no. 18 Rt.001/001 Desa Karang Haur Kec.Pabayuran Kabupaten Bekasi, tanggal 18-10-2012, jam: 17.00-17.40

sawah-sawah di Bekasi bisa dialiri air dengan baik. Tentunya bekerjasama dengan pusat dan juga provinsi”.<sup>65</sup>

Neneng Hasanah Yasin merupakan putri dari petani tulen di Kecamatan Pebayuran. Karir politik anak pertama dari enam bersaudara ini dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pemilu Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Di organisasi, Neneng cukup mendapatkan pengalaman, dari sekian banyak organisasi yang ditekuninya, Neneng pernah menjabat sebagai Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Bekasi, Bendahara KONI Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua Mapanjas Jawa Barat dan Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.

Penulis yang berkesempatan mewawancarai langsung figur Neneng Hasanah Yasin tersebut, melihat bahwa ia adalah sosok yang supel dan sederhana. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh penulis, Romi Oktaviansyah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Demokrat, yang juga masuk sebagai tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin ini mengatakan bahwa:

“Meskipun saya dari partai politik yang berbeda dengan Neneng, tapi kedekatan saya dengan keluarga M. Yasin sudah sangat lama. Sosok Neneng Hasanah Yasin adalah figur yang sangat sederhana dan mudah sekali dekat dengan rakyat, sehingga sangat mudah baginya menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. Meski begitu, keberhasilannya menjadi Bupati

---

<sup>65</sup> *Ibid*

pada Pemilu pada tahun 2012 sangat erat kaitannya dengan figur M. Yasin (Bapak Neneng)<sup>66</sup>.

#### D.1.2. Faktor Ketokohan Orang Tua Neneng Hasanah Yasin

Keberhasilan Neneng Hasanah Yasin sangat erat kaitannya dengan M. Yasin, mengapa demikian, karena hampir seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi sangat mengenal M. Yasin, ia adalah seorang petani tulen yang terkenal dengan berhektar-hektar sawah yang ia punya di wilayah Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang.

M. Yasin lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bekasi dari awal mula pemerintah pusat berinisiatif membantu rakyat miskin melalui beras raskin. Yang dimana M. Yasin memenangkan *tender* tersebut mengalahkan beberapa pengusaha beras lainnya, kemenangan itu didasari karena M. Yasin memiliki pasokan beras yang cukup banyak untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi.

Kemudian kemenangan *tender* itu juga karena beras yang diambil dari hasil ladang milik M. Yasin tersebut, baru dibayarkan oleh pemerintah dalam kurun waktu tiga bulan sekali, sedangkan beras itu harus diberikan satu bulan sekali kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi. Tidak kurang dari tiga ribu ton perbulan beras disalurkan untuk rakyat miskin di Wilayah Kabupaten Bekasi.

---

<sup>66</sup> Informasi diperoleh dari hasil wawancara langsung bertempat di Bekasi Squaer, tanggal 09-11-2012, jam : 14.00-15.30

Dari hal tersebut M. Yasin sangat tersohor di Kabupaten Bekasi, meskipun beras untuk rakyat miskin itu adalah dari uang pemerintah pusat. Tapi masyarakat Kabupaten Bekasi lebih mengenal beras tersebut adalah beras M. Yasin.

kemudian M. Yasin juga memiliki tambang udang dan tambang ikan lele, memiliki ± 50 truk untuk disewakan, melihat Kabupaten Bekasi adalah wilayah yang sangat akrab dengan sumber industri, pertanian, dan perdagangan yang sangat berar. Penyewaan truk dengan nama ar-Ridho tersebut banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, M. Yasin juga memiliki pondok pesantren gratis untuk yatim piatu.

Hidayatullah yang menjabat sebagai pengurus DPD Partai Golkar tersebut mengatakan:

“Sekitar 5000 hektar tanah yang dimiliki oleh M. Yasin, dan itu belum terhitung yang ada diluar daerah Kabupaten Bekasi”.<sup>67</sup>

“Penulis yang berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan M. Yasin (Bapak dari Neneng Hasanah Yasin), penulis menanyakan perihal apa yang di ungkapkan oleh Hidayatullah tersebut. M. Yasin menjawab sambil tertawa kecil (berguyon) beliau mengatakan: “Kalau hanya 5000 hektar itu berarti tanah saya hanya satu Kecamatan Pebayuran saja donk”.<sup>68</sup>

Artinya secara tersirat M. Yasin mengungkapkan bahwa dirinya memiliki lebih dari 5000 hektar sawah. Sependapat dengan apa yang

---

<sup>67</sup> Wawancara langsung penulis dengan narasumber di sekretariat DPD Partai Golkar, lokasi Ruko Deltamas Cikarang, tanggal 18-10-2012, jam 11.30-13.45

<sup>68</sup> Wawancara dilakukan di rumah kediaman Neneng Hasanah Yasin alamat: Jl. Raya Pabayuran no. 18 Rt.001/001 Desa Karang Haur Kec.Pabayuran Kabupaten Bekasi, tanggal 18-10-2012, jam: 19.00-20.25

dikatakan oleh Saepudin Juhri seorang guru SMP yang mengaku sebagai orang asli Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa:

“Faktor Kemenangan Nero banyak dipengaruhi oleh M. Yasin, Bapak dari Neneng Hasanah Yasin adalah salah satu orang terkaya di Kabupaten Bekasi yang memiliki ribuan hektar tanah, bahkan saya pernah mendengar M. Yasin sudah mendapat larangan oleh pemerintah untuk membeli tanah lagi, itu karena sudah melampaui batas kepemilikan tanah, banyak tanah atau sawah yang dimiliki M. Yasin itu memakai nama lurah Ejen”.<sup>69</sup>

Lurah Ejen sangat dikenal dekat sekali dengan M. Yasin, dan kebetulan kediaman lurah Ejen juga dekat dengan kediaman Saepudin Juhri. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Saepudin Juhri. Ali Yafie Ketua RT 003/01Kampung Ceger Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, mengungkapkan meskipun dirinya belum pernah berkomunikasi langsung dengan M. Yasin, tetapi beberapa kali ia pernah bertemu dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Partai Golkar di Kampung Ceger.

Menurut Ali Yafie “Sosok M. Yasin sangat akrab ditelinga masyarakat Kabupaten Bekasi, bahkan kemenangan yang diraih oleh anaknya Neneng Hasanah Yasin itu pun karena sosok M. Yasin yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. M. Yasin juga memiliki Kekayaan yang memang tidak bisa saya rinci semua, akan tetapi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bekasi adalah sawah milik M. Yasin”.<sup>70</sup>

Pendapat berbeda diutarakan oleh Engkos Kosasih seorang supir khusus untuk antar jemput karyawan yang bekerja di PT. Pertamina Kabupaten Bekasi, ia mengatakan :

<sup>69</sup> Wawancara dilakukan penulis di rumah kediaman narasumber, Jl. Rengas Bandung Rawa Kuda Desa Karang Harum Kecamatan Kedung Waringin, tanggal 18-10-2012, jam: 15.15-16.45

<sup>70</sup> Informasi didapat berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber di Posko Rw 01, Kampung Ceger Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, tanggal : 10-11-2012 jam: 10.30-11.45

“Wajar saja Neneng Hasanah Yasin menang karena dia akan melakukan “Politik uang” atau membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih nomor urut satu. Yah,,, lagipulakan keluarga Neneng Hasanah Yasin adalah salah satu keluarga terkaya di Kabupaten Bekasi, pastinya kemenangannya banyak dipengaruhi karena faktor kekayaan orangtuanya”.<sup>71</sup>

Penulis pun berkesempatan mewawancarai beberapa ibu rumah tangga yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Iin Khoiriyah yang mengaku mendukung Neneng Hasanah Yasin pada Pemilu pada tahun 2012 itu, mengatakan bahwa:

“Saya mengenal Neneng Hasanah Yasin karena dia adalah anak dari M. Yasin. Bapak saya (Iin Khoiriyah) pernah bekerja di sawah milik M. Yasin di daerah Bebelan Kabupaten Bekasi. Atas dasar itulah, saya memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi”.<sup>72</sup>

Selain itu menurut Iin Khoiriyah, sosok M. Yasin adalah orang yang cepat dekat dengan siapapun dan bisa berbaur dengan masyarakat yang minim dari segi ekonomi.

Sebagaimana hal tersebut di atas terkait dengan ketokohan yang dimiliki oleh M. Yasin, juga diperkuat dengan pendapat Muharrom salah satu tokoh masyarakat Bekasi, yang juga menjabat sebagai salah satu Dewan Pembina organisasi besar Kota dan Kabupaten Bekasi yaitu BKMB BHAGHASASI. Yang mengatakan bahwa :

“Kemenangan Neneng Hasanah Yasin sangat banyak di pengaruhi oleh ketokohan ayahnya, karena M. Yasin adalah sosok orang kaya

<sup>71</sup> Informasi diperoleh langsung dari Narasumber Engkos Kosasih, bertempat : di Jl. Raya industri tegal gede.Rt.11/04 desa pasir sari kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi, tanggal:11-11-2012, jam : 13.25-14.10

<sup>72</sup> Informasi diperoleh langsung dari Narasumber yang bersangkutan, dan data diperoleh di Ujung Harapan Rt.01/14 Desa Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi pada tanggal:12-11-2012 jam.09.00-09.45

yang dermawan dan supel, hampir tidak pernah *absen* saat idul adha tiba, beliau sering mengirimkan hewan kurbannya di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi, ± 5 ekor sapi kurban dan 15 ekor kambing kurban dibagbagikannya. Akan tetapi kerja Tim koalisi juga sangat besar pengaruhnya, pastinya itu disebabkan dari beberapa perencanaan yang matang yang dilakukan oleh Partai Koalisi yang notabennya adalah partai-partai besar”<sup>73</sup>.

Risma Mulyani salah seorang tokoh perempuan di Desa Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, yang sehari-hari memberikan Tausiyah atau mengisi ceramah dalam pengajian Ibu-ibu tersebut, memberikan pendapatnya terhadap kesuksesan Neneng Hasanah Yasin. ia mengatakan tidak begitu mengenal sosok Neneng Hasanah Yasin, akan tetapi ia tidak asing dengan sosok M. Yasin yang banyak dibicarakan oleh masyarakat sekitar tempat dimana Risma Mulyani tinggal.

Risma Mulyani mengatakan :

“M. Yasin terkenal dengan banyaknya sawah yang dimilikinya, jadi wajar saja Neneng Hasanah Yasin menang karena kan banyak petani-petani di Kabupaten Bekasi yang bekerja di sawah milik M. Yasin”.<sup>74</sup>

Meski demikian Risma mengaku ia bukanlah pendukung dari Neneng Hasanah Yasin. akan tetapi ia mendukung pasangan dengan nomor urut dua yaitu Sa'duddin, dan Jamal Lulail, yang di usung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

<sup>73</sup> Wawancara Langsung di Sekretariat BKMB BHAGASASI Jl.RA. Kartini 9 Rt 03/05 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur, Tanggal 28 Oktober 2012, Jam: 09.35-10.45

<sup>74</sup> Informasi diperoleh di rumah kediaman ibu Risma Mulyani di Kampung Baleker, Rt.003/04 Desa waringin Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, tanggal : 10-11-2012 jam: 14.15-15.00

## D.2. Faktor Partai Pendukung

Mobilisasi mesin partai yang terstruktur dan adanya kerjasama yang baik antara pengurus tingkat daerah hingga tingkat desa dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan figur Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilukada tahun 2012 kepada masyarakat kabupaten Bekasi, menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan tim sukses dalam memenangkan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi dalam Pemilukada tahun 2012.

Menurut Daeng Muhammad (Ketua DPD PAN), mengatakan bahwa :

“Kader-kader partai politik yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Baik berasal dari Partai Golkar sebagai partai yang mengusung dan Partai Demokrat juga PAN dalam hal ini sebagai partai pendukung. Kader-kader yang menjabat sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Bekasi, mereka pun memiliki massa panitik di daerah pemilihannya masing-masing sehingga ada relawan-relawan bentukan dari masing-masing Anggota DPRD dalam turut serta memenangkan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012”.<sup>75</sup>

Iif Bustomi mengatakan, bahwa :

“Kader-kader partai yang tergabung dalam memenangkan pasangan NERO, terus melakukan strategi komunikasi politik secara terus menerus selama proses Pemilukada berlangsung. Seluruh tim sukses pemenangan dan para relawan juga kader-kader partai politik. Secara intens berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya baik melalui pertemanan maupun kekeluargaan untuk memilih pasangan nomor urut satu (NERO), komunikasi yang dibangun kepada masyarakat dengan mengkemas isu politik yang menjadi jargon dari figur Neneng Hasanah Yasin tersebut “yang Muda, Cerdas, dan Lugas”.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Informasi penulis dapat berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber langsung bertempat di sekretariat gabungan tim-ses Neneng Hasanah Yasin. Jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 30-10-2012, jam 12.14-14.35

<sup>76</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis di sekretariat gabungan tim sukses pemenangan .Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja,S.Sos, Jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 19-10-2012, jam 13.00-15.30

Mobilisasi mesin partai yang berjalan satu arah dari pusat ke daerah sampai ke desa, dalam memenangkan NERO tersebut menjadi salah satu faktor meraih kemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi di tahun 2012.

### D.3. Faktor *Marketing* Politik

Latar belakang masyarakat kabupaten bekasi yang berpendidikan di atas rata-rata Jawa Barat, memiliki daya kritis terhadap pilihan-pilihan calon yang akan dipilih dalam Pemilukada, pemilih sejenis ini memiliki orientasi yang tinggi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa dengan visi misi dan program yang ditawarkan. Pemilih tidak lagi bodoh terutama di daerah perkotaan, mereka akan melihat kampanye bukan lagi sebagai retorika-retorika kosong atau pola-pola adu citra pasangan calon.

Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja menawarkan visi misi dan program sebagai upaya menghasilkan suara dari segmen pemilih kritis dan rasional, pasangan ini menawarkan program yang riil dan *eye catching* serta lebih mudah dipahami oleh masyarakat, diantara visi misi dan program pasangan Neneng Hasanah Yasin dalam mempromosikan pasangan NERO yaitu:

“Visi : terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017”.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Buku tentang visi misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 Pemilukada 2012, dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Bekasi, hal. 8

Misi :<sup>78</sup>

1. Membangun sumber daya manusia yang handal dan mampu menguasai IPTEK yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan;
2. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional;
3. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berbasis kerakyatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dalam rangka pengembangan potensi dan sumberdaya daerah;
5. Menggali dan mengembangkan sumber investasi daerah melalui pengembangan koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi daerah;
6. Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global;
7. Membangun sarana dan prasarana publik secara terpadu sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan memperhatikan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional.
8. Pemberdayaan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah; dan
9. Inventarisasi asset daerah, dimaksudkan untuk dapat mendata dan menginventarisir asset-asset daerah, sekaligus melakukan pemindahan asset-asset daerah yang berada di luar daerah Kabupaten Bekasi dengan melakukan pengelolaan serta memberikan sertifikasi terhadap seluruh asset daerah.

Sembilan program unggulan pasangan Neneng Hasanah Yasin dan

Rohim Minteraja yaitu :<sup>79</sup>

1. Membangun sumber daya manusia yang handal dan mampu menguasai IPTEK yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan;
  - a) Pemantapan sekolah gratis 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan fasilitas pendukungnya
  - c) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga pendidikan
  - d) Pemberian beasiswa bagi penduduk miskin
  - e) Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki standar kompetensi

<sup>78</sup> *Ibid*, hal, 11- 16

<sup>79</sup> *Ibid*, hal, 16-19

- f) Membuka lapangan kerja baru dalam rangka menekan angka pengangguran maningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
  - g) Revitalisasi puskesmas dan posyandu
  - h) Pemberian pelayanan puskesmas secara gratis dan bermutu
  - i) Pengembangan kebijakan berbasis gender
  - j) Pembentukan lembaga yang menangani permasalahan KDRT, *trafficking* perempuan dan perlindungan anak
  - k) Meningkatkan peran pemuda untuk berprestasi dalam segala bidang
  - l) Mendorong peningkatan prestasi atlet disemua cabang olahraga baik nasional dan internasional.
2. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional;
- a) Pengurusan Akte Kelahiran, KTP dan KK secara gratis
  - b) Penyederhanaan pelayanan perizinan
  - c) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu dan transparan melalui pembentukan lembaga yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa
  - d) Menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
  - e) Pengembangan pola karir PNS yang proposional dan transparan
  - f) Meningkatkan kesejahteraan PNS dan perangkat desa
  - g) Meningkatkan tunjangan operasional untuk Rt,Rw, guru ngaji, imam, dan marbot masjid, serta amil desa
  - h) Penyediaan pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat
  - i) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara optimal
3. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berbasis kerakyatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- a) Pemantapan program penguatan masyarakat miskin
  - b) Penyediaan dana tanggap bencana untuk mengantisipasi dampak bencana
  - c) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, angkutan, perumahan dan sanitasi lingkungan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dalam rangka pengembangan potensi dan sumberdaya daerah;
- a) Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
  - b) Peningkatan pembangunan jaringan irigasi
  - c) Revitalisasi saluran *drainase* perkotaan
  - d) Konservasi lahan dan pembangunan serta pemeliharaan embung/bendungan
  - e) Pengelolaan sumber daya alam yang berimplikasi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- f) Penyediaan dan peningkatan saluran air bersih
- g) Pembangunan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan sarana perhubungan
- 5. Menggali dan mengembangkan sumber investasi daerah melalui pengembangan koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi daerah;
  - a) Revitalisasi pasar tradisional
  - b) Fasilitasi dan bantuan modal bagi PKL, Pedagang pasar tradisional, koperasi, dan UMKM
  - c) Regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif
  - d) Promosi produk unggulan khas daerah
- 6. Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global;
  - a) Peningkatan infrastuktur pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan
  - b) Peningkatan infrastuktur industri
  - c) Peningkatan infrastuktur perdagangan
- 7. Membangun sarana dan prasarana publik secara terpadu sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan memperhatikan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional.
  - a) Pembangunan fasilitas pendidikan
  - b) Pembangunan fasilitas kesehatan
  - c) Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur transportasi
  - d) Revitalisasi terminal
- 8. Pemberdayaan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah,
  - a) Pemberian stimulus kepada desa dalam rangka pemantapan program pemberdayaan masyarakat desa
  - b) Penganggaran yang berpihak pada pemberdayaan desa
- 9. Inventarisasi asset daerah
  - a) Menginventarisir asset-asset daerah
  - b) Melakukan pemindahtanganan asset-asset daerah yang berada di luar daerah Kabupaten Bekasi
  - c) Pengelolaan asset daerah
  - d) Sertifikasi seluruh asset daerah

Visi, misi dan program merupakan presentasi dari isu dan kebijakan politik (*issues and politics*), sekaligus gambaran dari kebijakan atau program yang akan dilaksanakan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja jika mereka memenangkan Pemilu. Sementara itu, visi, misi dan

program juga sebagai *platform* dasar yang ditawarkan, dan dari sini para pemilih dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan pasangan tersebut.

Menurut Iif Syarif Bustomi, “visi misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, salah satu program yang menjadi unggulan adalah memberikan tunjangan operasional untuk Rt,Rw, guru ngaji, imam, dan marbot masjid, serta amil desa. Program itu memang terkesan simpel, tapi sangat berpengaruh dengan pemenangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO)”<sup>80</sup>.

Lebih lanjut Iif Syarif Bustomi (Tim sukses) mengatakan bahwa :

“Setiap RT/RW kan memiliki keluarga, dan dari keluarga mereka memiliki keluarga lagi, sehingga satu RT saja bisa membawa kurang lebih 5 orang pemilih, sehingga program tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pemenangan NERO”<sup>81</sup>.

Program kampanye pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja dikemas dalam bahasa yang sederhana, seolah menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi, yaitu mengenai pembangunan fasilitas pendidikan pembangunan fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai di Kabupaten Bekasi.

Ke sembilan program yang ditawarkan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja disosialisasikan melalui berbagai atribut media peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan stiker ke semua media peraga tersebut tersebar di beberapa lokasi yang ada di daerah Kabupaten Bekasi.

<sup>80</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis di sekretariat gabungan tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, S.Sos, Jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 19-10-2012, jam 13.00-15.30

<sup>81</sup> Ibid

Keberhasilan yang dicapai oleh tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi pada tahun 2012 itu, tidak terlepas dari keseriusan tim pemenangan dalam mengkemas isu baik yang yang tertuang dalam visi, misi, maupun program kerja yang kesemua itu pastinya berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut, dalam hal ini Partai Golkar sebagai partai pengusung, dan Partai Demokrat juga Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung, tim sukses Neneng Hasanah Yasin ini bekerjasama mulai dari pengurus tingkat daerah sampai kepada tingkat desa, hal ini dilakukan oleh kader-kader partai dalam mensosialisasikan visi, misi, dan juga program yang akan dilaksanakan oleh Neneng Hasanah Yasin jika menang sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilukada 2012. Para relawan pendukung Neneng Hasanah Yasin juga terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada disekitarnya baik melalui pertemuan formal maupun pertemanan.

Alasan yang mendasari kemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai Kepala daerah pada Pemilukada tahun 2012. Itu karena pengemasan isu juga program berdasarkan dengan kebutuhan, kegelisahan, dan harapan masyarakat. Singkatnya, tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin menawarkan akan memberikan tunjangan tambahan kepada RT/RW sebulan sekali, kemas ini dilakukan oleh tim pemenangan karena setiap RT maupun RW memiliki keluarga mereka masing-masing, sederhananya jika dihitung dari jumlah Rt dan rw yang ada di Kabupaten Bekasi dengan jumlah 23 Kecamatan, 182 desa, dan 5

kelurahan pastinya banyak memberikan pengaruh terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin.

“Searah dengan apa yang diungkapkan oleh Scammell (1995,1996) menyebutkan bahwa *marketing* politik dalam dunia politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan para pemilih”.<sup>82</sup>

Pada prinsipnya faktor promosi sosok Neneng Hasanah Yasin yaitu tidak terlepas dari figur M. Yasin dalam hal ini ayah kandung dari Neneng Hasanah Yasin, yang dimana banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak asing dengan beliau. Sehingga ketokohan dan nama besar beliau pun menjadi kemasam tim pemenangan dalam mensukseskan Neneng Hasanah Yasin sebagai Kepala daerah kabupaten Bekasi pada Pemilukada tahun 2012.

“Daeng Muhamad (Ketua DPD PAN) Kabupaten Bekasi menjelaskan, kemenangan NERO adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja bukan untuk kepentingan Partai, tapi untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Bekasi”.<sup>83</sup>

Menurut Sonhaji selaku Wakil Sekrtaris Tim Sukses pasangan NERO mengatakan, bahwa :

“Dengan kemenangan pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membawa perubahan. Terpilihnya NERO juga diharapkan program kerja Visi dan Misi yang

<sup>82</sup> Firmansyah, *Marketing politik antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal. 194

<sup>83</sup> <http://www.radarnusantara.com/2012/03/bupati-kabbekasi-termuda-di-indonesia>. di unduh pada tanggal 26-12-2012. Jam:15.00

dibuat oleh "Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja" akan kami kedepankan untuk lima tahun kedepan".<sup>84</sup>

Sonhaji menambahkan, bahwa Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja memiliki Empat Pilar program kerja unggulan yaitu:

1. Memberikan tunjangan kepada RT dan RW.
2. Memberikan 50.000 lapangan pekerjaan baru.
3. Memberikan infrastruktur jalan dan air bersih.
4. Memberikan pendidikan dan pengobatan gratis.

Karena ke 4 (empat) program tersebut adalah pilar yang harus kami kedepankan selama 5 (lima) tahun setelah Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

"Neneng Hasanah Yasin adalah satu-satunya Bupati Wanita termuda (berusia 31 tahun) di Kabupaten Bekasi dan juga termuda se-Indonesia, karena Neneng Hasanah Yasin adalah sosok wanita yang dapat menjadi panutan bagi wanita-wanita Indonesia dan juga menjadi wanita-wanita Kartini dan juga dapat menjadi serikandinya Kabupaten Bekasi untuk wanita Indonesia kedepan, karena derajat wanita sudah sederajat dengan laki-laki" ujar Sonhaji".<sup>85</sup>

Dari beberapa faktor yang memberi kontribusi terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilihan tahun 2012 tersebut, figur Neneng Hasanah Yasin yang memulai karir politiknya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap pemenangannya, karena dengan itu masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengenal dan melihat kontribusi apa yang sudah diberikan Neneng Hasanah

<sup>84</sup> Wawancara di sekretariat DPD Partai Golkar, lokasi Ruko Deltamas Cikarang, tanggal 18-10-2012, jam : 13.30-14.30

<sup>85</sup> *Ibid*

Yasin selama menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, seperti pembangunan jalan-jalan yang rusak di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi, dan pengobatan gratis yang sering dilakukan oleh Neneng Hasanah Yasin sebagai anggota dari perwakilan masyarakat Kota/kab Bekasi.

Selain itu, figur orang tua dalam hal ini M. Yasin (Bapak Neneng Hasanah Yasin) juga memberi kontribusi yang besar terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi pada Pemilu pada tahun 2012. Karena kesohoran M. Yasin sebagai seorang petani dan sebagai salah satu orang terkaya di Kabupaten Bekasi itu, yang memberi kontribusi terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin tersebut. Dengan kesohoran yang dimiliki oleh M. Yasin tersebut, sangat berpengaruh terhadap kemenangan yang diperoleh Neneng Hasanah Yasin pada Pemilu Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Faktor partai pendukung dalam hal ini Partai Golkar sebagai kendaraan yang digunakan oleh Neneng Hasanah Yasin tersebut, juga memiliki pengaruh terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2012.

Persoalan *internal* sempat terjadi dalam tubuh Partai Golkar pada masa pencalonan Neneng Hasanah Yasin, akan tetapi Partai Golkar bekerja secara solid dalam pemenangannya, kemudian partai pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional bekerjasama secara *intens* dan sungguh-sungguh dalam mengkemas isu dan direalisasikan dalam visi misi dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi, yang kemudian disosialisasikan oleh tim pemenangan pasangan Neneng Hasanah Yasin

dan Rohim Minteraja kepada masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai bentuk *marketing* politik.

Atas dasar itu, tim pemenangan memarketkan mengenai isu, yang dikemas dalam visi, misi, dan program kerja agar mampu menarik pemilih untuk menentukan hak suaranya untuk memilih Pasangan Nenengan Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja.

**BAB IV**  
**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN**  
**NENENG HASANAH YASIN DALAM PEMILUKADA**  
**KABUPATEN BEKASI**

**A. Strategi Pemenangan**

Strategi pemenangan Neneng Hasanah Yasin dapat dilihat melalui berbagai macam strategi yang akan penulis bahas di bawah ini, berdasarkan dengan data dan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Narasumber yang bersangkutan, dalam hal ini tim internal Partai Golkar yang mengusung Neneng Hasanah Yasin sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi, tim gabungan yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Tokoh Masyarakat, dan konsituen dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak suara.

**A.1. Strategi Mobilisasi Mesin Partai**

Struktur partai yang dalam hal ini berkaitan dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang mengusung dan mendukung Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi. Struktur partai ini, mulai dari pengurus tingkat daerah, pengurus kecamatan, kelurahan, dan RW. Keberadaan struktur tersebut memiliki peranan penting dalam mensukseskan calon yang telah diusung oleh partai.

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik<sup>86</sup>.

Mesin partai bisa bekerja dalam memenangkan calon Kepala Daerah yaitu melalui organisasi yang terstruktur, dan menjangkau ke pemilih di bawah. Organisasi inilah yang akan bergerak sebagai mesin dalam mengenalkan kandidat dan mengajak pemilih agar memilih kandidat yang didukung oleh partai. Dari cara ini, partailah yang menjadi faktor kunci dalam memenangkan pemilihan.

Melalui partai politik calon yang tidak dikenal dan tidak didukung, bisa diubah oleh partai menjadi dikenal dan didukung oleh partai. Mesin partai yang solid merupakan keunggulan dalam turut sertanya partai politik dalam mensukseskan calon kandidat yang diusungnya. Militansi kader partai juga sangat dibutuhkan dalam proses pemenangan Pemilukada, tentunya hal itu dilakukan secara terstruktur dari pengurus tingkat daerah sampai ke bawah.

Iif Syarif Bustomi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar, yang juga sebagai ketua tim sukses internal Partai Golkar dalam pemenangan Neneng Hasanah Yasin. Mengatakan bahwa:

“Partai Golkar dalam perjalanannya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2012 ini terjadi hambatan yang cukup besar terkait dengan pencalonan Neneng. Pencalonan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi yang di usung dari Partai Golkar ini, mengalami perpecahan di tubuh internal Partai Golkar, yang dimana ketua DPD Partai Golkar M. Darip Mulyana mencalonkan diri sebagai Bupati pada saat itu, justru tidak

<sup>86</sup> Miriam Buadiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi, 2007, hal.404

mendapat restu dari Partai Golkar. Iif Syarif Bustomi, menjelaskan alasan mengapa Partai Golkar mengusung Neneng Hasanah Yasin sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi pada waktu itu, berdasarkan dari intrupsi pengurus pusat Partai Golkar, yang alasan mendasarnya hanya pengurus pusat yang lebih mengetahui, pastinya setiap partai politik yang mengusung calon kandidat dari partainya menginginkan adanya hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan partai pada umumnya yaitu sebuah kemenangan”.<sup>87</sup>

Iif Bustomi menambahkan, “Keputusan pengurus pusat Partai Golkar sudah melakukan beberapa kali survey mengenai figur calon yang akan di usung oleh partai, yaitu antara Neneng Hasanah Yasin dengan Darip Mulyana berdasarkan hasil survey LSI (Lembaga Survey Indonesia) Neneng Hasanah Yasin lebih dominan dari Darip Mulyana, otoritas pengurus pusat Partai Golkar melihat dari elektabilitas, integritas, dan faktor lainnya yang harus dimiliki oleh calon yang akan di usung dari partai, kemudian berdasarkan hal tersebut Neneng Hasanah Yasin dianggap memiliki ciri yang diharapkan oleh partai”.<sup>88</sup>

Dari 57 jumlah pengurus Partai Golkar yang ada dalam struktur DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi di bawah pimpinan Darip Mulyana, hanya sisa 8 orang yang mendukung Neneng Hasanah Yasin. Yaitu (1) Iif Syarif Bustomi, (2) Hidayatullah, (3) Ir. Sabaranto, (4) Muhtada Sobirin, (5) Milin Kartono, (6) Achmad Budiarta, (7) Nana Rohana, dan (8) Ejen Zaenal Muttaqien. Selebihnya mendukung Darip Mulyana, pencalonan Darip Mulyana diusung oleh PDIP berpasangan dengan Jejen Sayuti.

Dari persoalan yang terjadi, maka pengurus provinsi langsung mengambil tindakan memberikan jabatan sementara DPD Partai Golkar M. Amin Fauzi, menggantikan M. Darip Mulyana.

<sup>87</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis di sekretariat gabungan tim sukses pemenangan .Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja,S.Sos, jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 19-10-2012, jam 13.00-15.30

<sup>88</sup> Ibid

Terlepas dari persoalan internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar, kerjasama tim sukses internal Partai Golkar tetap berlangsung, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN, melalui pengurus dari tingkat wilayah sampai tingkat desa, bekerjasama untuk mensukseskan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati. Karena pencalonan Neneng Hasanah Yasin diusung dan didukung oleh pengurus pusat Partai Golkar, maka dari minimnya pengurus DPD yang tersisa, tidak begitu mengalami hambatan, karena pengurus partai yang berada di kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa berpartisipasi aktif dalam memenangkan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilu tahun 2012 di Kabupaten Bekasi.

Dalam kemenangan Neneng Hasanah Yasin peran serta partai pendukung yaitu partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga berpengaruh besar terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin.

Mobilisasi yang dilakukan oleh partai pengusung dan partai pendukung yang tergabung dalam tim sukses gabungan pasangan NERO pada Pemilu Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yaitu:

- 1) Dilakukan berdasarkan kerjasama tim, yang dimana setiap partai politik memiliki tugas mengintrupsikan akar rumput dari partai masing-masing, maupun kader-kader yang berada dibawahnya, untuk turut serta mengambil peranan penting yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang figur calon Neneng Hasanah Yasin.

Iif Syarif Bustomi Wakil Ketua tim sukses gabungan kemenangan Nero menjelaskan, "Bahwa strategi kemenangan yang dilakukan oleh Partai Golkar berdasarkan dengan mobilisasi yang dilakukan partai yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berada di internal Partai

Golkar di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun yang berada di provinsi Jawa Barat, pendekatan ini dilakukan sejalan dengan terjadi perpecahan di tubuh Partai Golkar, agar Neneng Hasanah Yasin yang juga bersamaan dengan pencalonan diri M. Darip Mulyana mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh dari Partai Golkar di tingkat Wilayah, Daerah, dan Desa. Selain itu, semua Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Golkar mendukung melalui relawan-relawan nya masing-masing".<sup>89</sup>

- 2) Gerakan yang dilakukan oleh Partai adalah melakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis yang dilakukan di semua kecamatan. Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Partai Golkar sebagai partai yang mengusung Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati, Partai Demokrat dan PAN juga melakukan strategi yang sama yaitu mobilisasi partai masing-masing untuk bekerja mensosialisasikan pasangan NERO. Semua pengurus dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional di tingkat daerah sampai desa melakukan tugasnya masing-masing berdasarkan intrupsi pengurus DPD.

Daeng Muhammad, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai Sekretaris tim sukses gabungan pasangan NERO. Memberikan alasannya mengapa PAN mendukung pasangan tersebut, menurutnya:

"Politik itu rasional, terlepas dari itu, Neneng Hasanah Yasin bukan *incumbent*, Daeng Muhammad (Ketua Umum DPD PAN), Mengatakan ia paham betul bagaimana kinerja *incumbent* (Sa'duddin), sehingga PAN memutuskan untuk mendukung Neneng Hasanah Yasin. Keputusan PAN ini berdasarkan dengan pertimbangan strategis, politik, dan persoalan PAN ke depannya".<sup>90</sup>

Daeng Munhammad juga mengatakan bahwa "Kemenangan Neneng Hasanah Yasin tidak terlepas dari binaan PAN terhadap seni-seni budaya tradisional yang sudah lama menjadi salah satu program kerja Partai

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Informasi penulis di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber langsung bertempat di sekretariat gabungan tim-ses Neneng Hasanah Yasin. Jl. Raya Pemda Ruko Delta Mas Desa Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tanggal : 30-10-2012, jam 12.14-14.35

amanat Nasional di Kabupaten Bekasi. Bersamaan dengan jabatan Daeng Muhammad sebagai ketua paguyuban seni-seni budaya tradisional. Melalui seni budaya yang dikelolanya PAN melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui seni budaya tersebut, yang dimana terdapat perkumpulan antar masyarakat didalamnya".<sup>91</sup>

Di tempat yang berbeda, Romi Oktaviansyah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Demokrat, menjelaskan : "Strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrat sama halnya dengan yang dilakukan oleh Partai Golkar dan PAN yaitu kerja mesin partai untuk mensosialisasikan calon Bupati yang di dukung Partai Demokrat tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat ke beberapa kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi".<sup>92</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional dalam melaksanakan programnya.<sup>93</sup>

Mobilisasi mesin partai yang dilakukan tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin, meliputi :

Pertama, melibatkan seluruh kader partai yang ada di tingkat daerah dan desa-desa untuk mensosialisasikan mengenai calon Bupati Neneng Hasanah Yasin, dan bertugas menggalang suara dengan berinteraksi langsung mempengaruhi pilihan masyarakat yang bertujuan agar menentukan hak suaranya untuk Neneng Hasanah Yasin. Agenda aksi kader pada Pemilu pada 2012 di Kabupaten Bekasi bertumpu pada SDM yang harus mampu

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Informasi diperoleh dari hasil wawancara langsung bertempat di Bekasi Squaer, tanggal 09-11-2012, jam : 14.00-15.30

<sup>93</sup> Miriam Buadiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi, 2007, hal.404

berkomunikasi untuk mendeskripsikan tentang keunggulan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin untuk menjangkau serta mempengaruhi pilihan seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap dapil agar memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilu pada 2012. Program ini digerakkan oleh kader yang dikelola oleh struktur partai yang ada di kecamatan, dan struktur partai yang ada di kelurahan.

Kedua : *Event-Kampanye*, *event* yang dimaksud adalah program yang mengangkat beberapa *event* penting di tingkat daerah untuk penguatan citra kandidat Bupati sebelum masa kampanye terbuka. Program yang dilakukan beraneka ragam, mulai dari kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat. Yang dimana juga sangat berkaitan dengan profesi kandidat Neneng Hasanah Yasin sebagai dokter. Akan tetapi para kader partai tidak begitu kesulitan dalam kegiatan ini, karena Neneng Hasanah Yasin yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan kota dan Kabupaten Bekasi, sering melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Sedangkan kampanye yang dimaksud adalah pengelolaan kampanye terbuka secara efektif dan atraktif.

Kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan untuk mengkampanyekan keberhasilan-keberhasilan yang telah di capai oleh figur calon Bupati di Kabupaten Bekasi, antaranya di sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan. Dalam hal ini, calon kandidat erat kaitannya dengan figur M. Yasin bapak dari calon Bupati

Neneng Hasanah Yasin, keluarga besar Yasin terkenal dengan loyalitas dan sifat dermawan yang mereka miliki.

Dalam sektor pendidikan keluarga besar M. Yasin (Bapak dari Neneng Hasanah Yasin) telah menghibahkan sekian dari tanah yang dimilikinya untuk membangun pondok pesantren gratis untuk yatim piatu. Diantaranya Pondok Pesantren Al-Bina dan Pesantren Hidayatunnajah di Kabupaten Bekasi. Selain itu dalam hal kesejahteraan, keluarga Yasin yang tersohor sebagai orang terkaya di Kabupaten Bekasi yang memiliki berhektar-hektar tanah dan sudah mendapat larangan oleh pemerintah untuk membeli tanah tersebut, penulis tidak mengetahui secara *detail* berapa hektar tanah yang dimiliki oleh M. Yasin tersebut.

Penulis yang berkesempatan mewawancarai langsung M. Yasin di kediamannya sebelum wafatnya (Wafat: 18-12-2012), mengatakan bahwa:

“Kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama berlangsung dilakukannya salah satunya adalah memberikan beras kepada anak yatim setiap bulan sebanyak satu ton setengah”.<sup>94</sup>

“Selain itu setiap Idul Adha M. Yasin mengaku mengorbankan tidak kurang dari 15 ekor sapi dan 25 ekor kambing diqurbankan dan diberikan kepada masyarakat di sekitar daerah Kabupaten Bekasi yang menjadi lokasi-lokasi pilihannya, mendirikan 12 masjid di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bekasi diantaranya di daerah Muara Gembong Kabupaten Bekasi”.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Wawancara dilakukan di rumah kediaman M. Yasin alamat: Jl. Raya Pabayuran no. 18 Rt.001/001 Desa Karang Haur Kec.Pabayuran Kabupaten Bekasi, tanggal 18-10-2012, jam: 19.00-21.00

<sup>95</sup> *Ibid*

Menurut Hidayatullah salah satu pengurus DPD Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris tim sukses pemengan Neneng Hasanah Yasin mengatakan bahwa:

“Selain memberikan beras untuk anak yatim sebanyak satu ton perbulannya, M. Yasin juga banyak berkontribusi terhadap wilayahnya dalam mensejahterakan masyarakat sekitar, dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, baik sebagai petani yang menggarap dan mengelola sawah-sawah yang dimiliki M. Yasin, mengelola dan menjaga tambak ikan lele dan udang, serta penyewaan mobil truk ar-Ridho yang beliau miliki pula. Sebenarnya masih banyak kekayaan yang dimiliki M. Yasin akan tetapi rasanya saya tidak etis membicarakannya secara rinci itulah yang di ungkap oleh Hidayatullah tersebut”.<sup>96</sup>

Menurut Son Haji sekretaris DPD Partai Golkar mengatakan, bahwa : “Ketika menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Neneng Hasanah Yasin juga memberikan kontribusinya dalam peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi. Jauh sebelum pencalonan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi pada Pemilukada tahun 2012, saat Neneng menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa hal seperti, bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis dan peran sertanya dengan melakukan peningkatan inprastruktur di Kabupaten Bekasi”.<sup>97</sup>

Hal tersebut, menjadi cara tim sukses mensosialisasikan sosok figur calon, dalam meningkatkan citra figur. Komunikasi politik yang efektif melalui komunikasi langsung secara tatap muka baik dilakukan dari rumah ke rumah, maupun dilakukan dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh tim sukses.

Ketiga: Selanjutnya penggunaan atributisasi dalam mensosialisasikan icon Neneng Hasanah Yasin, dengan memberikan keyakinan kepada pemilih terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Neneng Hasanah Yasin dan

<sup>96</sup> Wawancara di sekretariat DPD Partai Golkar . lokasi : Ruko Deltamas Cikarang.tanggal 18-10-2012 jam: 11.30-13.45

<sup>97</sup> Wawancara di sekretariat DPD Partai Golkar . lokasi : Ruko Deltamas Cikarang.tanggal 18-10-2012 jam: 13.30-14.30

memperkuat isu program yang sedang digulirkan. Atributisasi meliputi pemasangan spanduk, baliho, pembagian kaos, stiker, poster, dan benner. Slogan yang digulirkan dan di angkat lebih kepada sosok calon yang lebih muda dari calon Bupati yang lain, slogan yang digunakan yaitu muda, cerdas, dan lugas.

Keempat : Menekankan pada pengelolaan administrasi pemilu dan sistem informasi struktural pra dan pasca pemilihan serta membangun sistem kontrol dan evaluasi program pemenangan di setiap struktur. Salah satu administrasi pemilu adalah advokasi pengamanan suara, pengarahan para saksi di setiap TPS, pengamanan suara merupakan pengamanan suara calon Neneng Hasanah Yasin dari hal-hal yang dapat merugikan suara calon tersebut, baik yang bersifat *human error* maupun *by design*, pada saat pemilihan maupun setelah pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilukada tahun 2012 tim sukses melakukan beberapa elemen penting struktur pengamanan suara, yaitu terdiri dari :

- a) Adanya tim advokasi, memberikan dukungan payung hukum terhadap berbagai kasus pengamanan suara;
- b) Tim administrasi dan penggunaan IT, bertugas mengkoordinasi saksi-saksi di TPS dan PPK melalui *data center/real count*;
- c) Mengerahkan kader-kader partai untuk menjadi saksi-saksi di TPS, dalam hal ini saksi di ambil dari kader Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai

salah satu partai politik yang mendukung pemenangan Neneng Hasanah Yasin sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2012;

- d) Melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap saksi. Dalam hal ini, dukungan mesin Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional terhadap calon Bupati Neneng Hasanah Yasin secara terstruktur dari pengurus partai yang ada di tingkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Menjadi bentuk kerja tim yang solid yang dilakukan oleh tim gabungan pendukung Neneng Hasanah Yasin dalam Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012, masing-masing partai politik yang mendukung menjalankan fungsi partai dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan harapan bersama terhadap hasil yang diinginkan yaitu “kemenangan”.

Secara teoritis fungsi partai politik di Negara yang demokrasi partai bisa sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat, yang dimana aspirasi ataupun pendapat masyarakat bisa di tampung oleh partai, dan dimana partai politik bisa menyalurkan ide ataupun aspirasi masyarakat melalui kebijakan yang akan dibuat oleh partai itu sendiri.

## **A.2. Strategi Pengerahan Kader Partai**

Mobilisasi mesin partai tidak terlepas dari peran kader di bawah yang memperkenalkan figur calon Bupati Neneng Hasanah Yasin kepada keluarga masing-masing, tetangga, dan melalui pertemanan. Sementara itu peran kader yang menjadi saksi di TPS yang jumlahnya cukup banyak, telah membantu dalam perhitungan suara yang ada di setiap TPS yang ada perhitungan tersebut bisa

langsung disampaikan melalui sms sebagai jalan cepat tim sukses mengetahui sejauh mana suara yang diperoleh oleh tim sukses terhadap kemenangan Neneng Hasanah Yasin, selain itu para saksi diminta mengumpulkan berita acara perhitungan suara di setiap TPS sebagai proses pengamanan suara. Mobilisasi mesin partai telah dilaksanakan oleh tim sukses dalam memenangkan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi.

Kader merupakan *asset* penting bagi sebuah partai politik, kader merupakan anggota partai yang telah melalui proses pembinaan. Komunikasi politik yang efektif yang dilakukan oleh kader partai sebagai bagian dari struktur kemenangan figur calon Bupati yang penting pengaruhnya, karena strategi komunikasi politik yang terencana dan berkualitas adalah bagian dari kunci kemenangan figur calon yang di usung dan didukung oleh partai. Melalui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kader partai dalam mempengaruhi pemilih dengan propaganda politik, citra figur, isu politik, dan program yang ditawarkan dalam mengusung dan mendukung Neneng Hasanah Yasin dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2012.

### **A.3. Strategi Program Kampanye Kandidat**

Strategi selanjutnya adalah strategi program kampanye yang menjual yang dibuat oleh tim sukses kemenangan Neneng Hasanah Yasin. Dalam mensosialisasikan figur calon melalui kemasam visi dan misi serta program yang dibuat oleh tim sukses kemenangan.

Berdasarkan dengan visi, misi, dan program yang ada pada bab II, visi misi dan program kerja yang telah di buat oleh tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi tersebut. Guna, mensosialisasikan figur calon.

Pelaksanaan kampanye yang sudah dijadwalkan oleh KPUD Kabupaten Bekasi, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup, hal itu dimanfaatkan oleh tim sukses untuk mensosialisasikan sosok figur calon kepada khalayak yang memiliki hak suaranya. Tim pemenangan Neneng Hasanah Yasin pun secara intensif melakukan pendekatan-pendekatan secara perseorangan, melalui komunikasi dengan tatap muka secara langsung dengan konsituen dalam hal ini yang memiliki hak suaranya yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komunikasi politik yang dibangun oleh tim sukses yaitu dengan cara memasarkan figur calon Neneng Hasanah Yasin, berisikan tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, dll. Dalam hal ini pun Neneng Hasanah Yasin yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kerap kali mengadakan bakti sosial melalui pengobatan gratis di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bekasi, senada dengan profesinya sebagai dokter. Atas dasar itu, tim sukses memberikan pandangan-pandangan kepada konsituen yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada tahun 2012 tersebut untuk memilih pasangan dengan nomor urut satu.

“Selain tim sukses yang bekerjasama mensosialisasikan sosok figur calon tersebut. Menurut M. Yasin (Bapak dari Neneng Hasanah Yasin),

mengaku ia pun melakukan kunjungan ke berbagai kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Hampir setiap hari dilakukannya, M. Yasin mengatakan bahwa selama proses pelaksanaan Pemilu tersebut berlangsung, dalam waktu empat bulan hanya 12 malam ia tidur di rumahnya, selebihnya dihabiskan singgah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurutnya, kita boleh mempercayakan kemenangan Neneng Hasanah Yasin kepada tim sukses yang sudah ada, akan tetapi masyarakat akan merasa lebih terbuka jika kita sebagai yang punya kepentingan terjun langsung ke lapangan”.<sup>98</sup>

Dari hal tersebut, pastinya bisa menjadi kemudahan bagi Neneng Hasanah Yasin menjadi Kepala Daerah, karena pada dasarnya Neneng Hasanah Yasin lebih tersohor dengan kekayaan dan kedermawanan yang dimiliki oleh bapaknya dalam hal ini M. Yasin.

Kunjungan M. Yasin ke beberapa desa di Kabupaten Bekasi pun dipaparkan oleh Daeng Muhammad (sekretaris tim kemenangan Neneng Hasanah Yasin) hal itu menjadi senjata besar dalam mensukseskan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati di Kabupaten Bekasi, karena masyarakat akan merasa bangga dan dapat menyalurkan aspirasinya mengenai kehidupan mereka masing-masing. Terkadang masyarakat pun ada yang meminta berbagai bantuan, baik untuk pembangunan mushola, aula pengajian, sampai kepada kebutuhan olahraga lainnya. Hal tersebut, juga di katakan oleh M. Yasin yang penulis temui di kediamannya.

Terlepas dari kesohoran M. Yasin tersebut, seluruh tim sukses pun bekerja melalui program-program sosial untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi, itu dilakukan tim sukses secara menyeluruh di berbagai desa yang ada di Kabupaten

<sup>98</sup> Wawancara dilakukan di rumah kediaman alm. M. Yasin alamat: Jl. Raya Pabayuran no. 18 Rt.001/001 Desa Karang Haur Kec.Pabayuran Kabupaten Bekasi, tanggal 18-10-2012, jam: 19.00-20.25

Bekasi, kondisi wilayah yang luas dan besar tidak menjadi persoalan yang berarti bagi tim sukses, karena dilakukan berdasarkan intrupsi dari masing-masing pimpinan partai politik kepada kader-kader di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Sehingga penyampaian program guna mensosialisasikan figur calon dapat tersampaikan kepada para konsituen yang memiliki hak suara.

Iif Syarif Bustomi Wakil Ketua tim sukses gabungan pemenangan Neneng Hasanah Yasin menjelaskan bahwa strategi pemenangan dilakukan adalah melalui salah satu program kerja yang ditawarkan Neneng Hasanah Yasin tersebut yang berisikan bahwa setiap bulan nya pengurus RT dan RW diberikan tunjangan, Iif Syarif Bustomi mengatakan bahwa strategi itu diberikan karena pandangan bahwa setiap RT maupun RW memiliki istri atau pun anak-anak bahkan tidak sedikit pengurus RT/RW yang memiliki keluarga besar yang punya hak suara dalam Pemilukada di Kabupaten Bekasi. Sehingga mereka bisa saling mempengaruhi satu dengan lainnya untuk memilih pasangan dengan nomor urut satu yaitu Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pencapaian keberhasilan dalam pesta demokrasi pada ajang pemilihan Kepala Daerah di wilayah manapun, dibutuhkan strategi yang berkualitas, baik dari segi perencanaan dan pelaksanaannya. *Marketing* politik yang dilakukan untuk memarketkan figur calon, isu atau visi misi calon yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah menjadi bagian dari faktor kemenangan seorang kandidat. Hal demikian, juga dilakukan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO) dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi adalah salah satu wujud pelaksanaan Demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Bekasi mempunyai tiga pasang calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi : yaitu (1). Pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja yang diusung dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. (2). Pasangan Sa'duddin dan Jamal Lulail, yang di usung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan (3). Pasangan M. Darip Mulyana dan Jejen

Sayuti, yang di usung dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PBB, Partai Gerindra, PBR, dan PKPI.

Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perolehan suara terbanyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi diraih oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, S.Sos, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, dengan memperoleh suara sah sebanyak **442.857 suara** dengan presentase **41,06%** dari **1.078.603 suara**.

Nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan Sa'duddin dan Jamal Lulail, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sah sebanyak **331.638 suara** dengan presentase **30,75 %** dari **1.078.603 suara**.

Dan pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan M. Darip Mulyana dan Jejen Sayuti, yang diusung dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PBB, Partai Gerindra, PBR, dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak **304.108 suara** dengan presentase **28,19 %** dari **1.078.603 suara**.

Kemenangan NERO didasari dari beberapa faktor yang menjadi pengaruh besar terhadap kemenangan Nero, figur Neneng sebagai kandidat calon, menjadi bagian penting dalam kemenangannya pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2012. Neneng mencetak sejarah. Dialah satu-satunya bupati Bekasi pertama dari kalangan perempuan. Karena itu, pantas saja, perempuan yang masih

aktif sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat ini pada masa pencalonannya sebagai Bupati Bekasi tahun 2012, tidak hanya bangga dan bahagia karena persoalan *gender* tidak menghalangi mimpinya memimpin tanah kelahirannya. Bahkan, usianya terbilang paling muda di antara bupati-bupati Bekasi sebelumnya.

Lebih lanjut, kemenangan Neneng berkaitan erat dengan faktor ketokohan ayahandanya. Keberhasilan Neneng Hasanah Yasin sangat erat kaitannya dengan M. Yasin (Bapak dari Neneng Hasanah Yasin), mengapa demikian, karena hampir seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi sangat mengenal M. Yasin, ia adalah seorang petani tulen dan salah satu orang terkaya di Kabupaten Bekasi.

Faktor kemenangan Nero selanjutnya, adalah faktor partai pendukung. Mobilisasi mesin partai yang terstruktur dan adanya kerjasama yang baik antara pengurus tingkat daerah hingga tingkat desa dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan figur Neneng Hasanah Yasin dalam Pemilu tahun 2012 kepada masyarakat kabupaten Bekasi, menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan tim sukses memenangkan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi dalam Pemilu tahun 2012.

Marketing politik juga menjadi bagian penting dalam mensukseskan figur calon kandidat pada ajang pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, tim sukses pasangan NERO melakukan gerakan dalam mensosialisasikan pasangan NERO melalui visi misi dan program merupakan presentasi dari isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), sekaligus gambaran dari kebijakan atau program yang akan

dilaksanakan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja jika mereka memenangkan Pemilu. Sementara itu, visi, misi dan program juga sebagai *platform* dasar yang ditawarkan, dan dari sini para pemilih dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan pasangan tersebut.

Visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja, salah satu program yang menjadi unggulan adalah memberikan tunjangan operasional untuk RT, RW, guru ngaji, imam, dan marbot masjid, serta amil desa. Menurut Iif Syarif Bustomi program itu memang terkesan *simpel*, tapi sangat berpengaruh dengan kemenangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Minteraja (NERO), menurut Iif Syarif Bustomi (tim sukses), mengatakan bahwa setiap RT/RW kan memiliki keluarga, dan dari keluarga mereka memiliki keluarga lagi, sehingga satu RT saja bisa membawa kurang lebih 5 (lima) orang pemilih, sehingga program tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap kemenangan NERO.

Keberhasilan NERO sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupaten Bekasi tahun 2012 menggunakan beberapa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim kemenangan NERO, dimulai dari strategi mobilisasi mesin partai, pasangan Nero di dukung dari tiga partai politik (Golkar, Demokrat, PAN). Melalui partai politik calon yang tidak dikenal dan tidak didukung, bisa diubah oleh partai menjadi dikenal dan didukung oleh partai. Mesin partai yang solid merupakan keunggulan dalam turut sertanya partai politik dalam mensukseskan calon kandidat yang diusungnya. Militansi kader partai juga

sangat dibutuhkan dalam proses pemenangan Pemilukada, tentunya hal itu dilakukan secara terstruktur dari pengurus tingkat daerah sampai ke bawah.

Strategi selanjutnya adalah strategi pengerah kader dari partai politik, NERO yang didukung dari partai (Golkar, Demokrat, dan PAN), ke tiga partai tersebut, memiliki kader-kader yang dikerahkan untuk turut serta membantu dalam pemenangan pasangan Nero pada Pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012.

Strategi selanjutnya adalah strategi program kampanye yang menjual yang dibuat oleh tim sukses pemenangan Neneng Hasanah Yasin. Dalam mensosialisasikan figur calon melalui kemasam visi dan misi serta program yang dibuat oleh tim sukses pemenangan.

Selain tim sukses yang bekerjasama mensosialisasikan sosok figur calon tersebut. M. Yasin (Bapak dari Neneng Hasanah Yasin) pun melakukan kunjungan ke berbagai kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Hampir setiap hari dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah. Rozali, "*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*", PT. Raja Grafindo, 2005.

Abdullah. Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005

Agustino. Leo, *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Alfian M. M. Alfian, Dkk, "*Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung*", Akbar Tandjung Institut, 2005.

Amiruddin, "*Pilkada Langsung Problem dan Prospek*", Pustaka Pelajar, 2008.

Ansoff. Igor, "Implanting Strategic Management", 1990

Arifin. Anwar, *Media dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Pusat Studi Komunikasi & Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, 2011

Arifin. Anwar, *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003

Arifin. Anwar, *Pencitraan dalam Politik, Strategi Pemenangan PEMILU dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006

Arrianie. Lely, *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di panggung Politik*, Bandung: Widya Padjajaran, 2010

- Budiarjo. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta : PT. IkrarMandiriabadi, 2008
- Cangara. Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Djafar. Massa. TB, *Demokratisasi: DPRD dan Masalah Penguatan Politik Lokal*, Jurnal Politik Vol 3/No.2 tahun 2007
- Effendy. Uchjana. Onong, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Fakih. Mansour, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", Insispres, Bandung, 2002.
- Firmansyah, "*Marketing Politik:Antara Pemahaman dan Realitas*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Hasan. Effendi, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah pembangunan . Partisipasi, kebijakan dan Dinamika Politik*, Vol 7 No.13. 2011
- Hikmat. H. Mahi, *Komunikasi Politik, Teori dan Praktek dalam Pemilukada Langsung*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011
- Idris, Kartini Fahmi, "*Jati Diri Perempuan Muslim (Perspektif Islam terhadap Kesejahteraan Gender*", UI Press, Jakarta, 2006.
- Kusuma. Surya, *Panduan Sukses Kampanye Pemilu 2009*. Tangerang : Pustaka Cendekiamuda, 2008
- Moleong. J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Nimmo. Dan, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

- Nursal. Adman, *“Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD”*, Presiden. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Prihatmoko. Joko J., *“Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia”*, Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmat. Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja
- Romli Lili, *“Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia”*, PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, 2008.
- Romli. Lili, *Democracy Pemilukada*, jakarta : LIPI, Pusat Penelitian Politik, 2007
- Romli. Lili, *Potret Otonomi Daerah dan wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Schroder. Peter, *Strategi Politik Edisi Revisi untuk Pemilu 2009*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fur diefreiheit Indonesia, 2008
- Sigit. Suhardi, *“P*
- engantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen”*, Bandung, 1999.
- Surbakti. Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Wibowo. Wahyu, *Pembangunan, Pemberdayaan dan Partisipasi Politik di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 4 No. 1 2008

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 , *Tentang Pemerintah Daerah*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab\_011.329000/2012 *tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012*

## C. Jurnal

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Pemilukada dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, No.16/tahun VI Agustus 2005

## D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/strategi>.

<http://www.antaraneews.com/berita/301595/kpu--neneng-rohim-pemenang-Pemilukada-kabupaten-bekasi>

<http://www.radarnusantara.com/2012/03/bupati-kabbekasi-termuda-di-indonesia>.